



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap orang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. bahwa pembangunan pangan dan gizi harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terukur keberhasilannya, dan berkesinambungan, sehingga perlu disusun dokumen perencanaan aksi daerah tentang pembangunan pangan dan gizi sebagai panduan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024 – 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024 – 2026.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-PG ini sebagai panduan, arahan, dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Pangan dan Gizi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-PG ini yaitu:

- a. meningkatkan pemahaman terkait peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perbaikan dan pemantapan ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. meningkatkan kemampuan analisis perkembangan situasi Pangan dan Gizi di setiap wilayah dengan tujuan:
 1. menetapkan prioritas penanganan masalah Pangan dan Gizi;
 2. memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
 3. membangun dan memfungsikan lembaga Pangan dan Gizi; dan
 4. memantau dan mengevaluasi pembangunan Pangan dan Gizi.
- c. mengintegrasikan, menyelaraskan, dan implementasi program/kegiatan/sub kegiatan terkait Pangan dan Gizi secara terpadu, rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik;

- d. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas terkait dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan dan Gizi yang berkelanjutan di tingkat Pemerintah Daerah dan Kapanewon; dan
- e. membangun dan mengoptimalkan lembaga Pangan dan Gizi di Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen RAD-PG Tahun 2024-2026 terdiri atas:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : ANALISIS SITUASI;
 - BAB III : RENCANA AKSI MULTI SEKTOR;
 - BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI;
 - BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN;
 - BAB VI : PENUTUP;
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi RAD-PG.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 4. sosial;
 - 5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 6. pangan;
 - 7. lingkungan hidup;
 - 8. pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - 9. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 10. komunikasi dan informatika;
 - 11. perdagangan;
 - 12. perindustrian;
 - 13. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 14. kelautan dan perikanan; dan
 - 15. pertanian.
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah:
 - 1. perencanaan; dan
 - 2. penelitian dan pengembangan.
 - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan;
 - e. instansi vertikal yang membidangi urusan pengawasan obat dan makanan; dan
 - f. instansi vertikal yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 23 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 84



RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6
I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	8
C. Tujuan Penyusunan	9
D. Dasar Hukum Penyusunan RAD Pangan dan Gizi	10
II. ANALISIS SITUASI	11
A. Situasi Saat ini	11
1. Bidang Pangan	12
a. Ketersediaan Pangan	12
b. Keterjangkauan Pangan	22
c. Pemanfaatan Pangan	24
2. Bidang Gizi	33
a. Situasi Gizi Balita	33
b. Kesehatan Bayi dan Balita	36
c. Kesehatan Ibu Hamil	39
d. Kesehatan Lingkungan, Pemukiman dan Sanitasi	43
B. Tantangan	48
1. Tantangan Aspek Ketersediaan	48
2. Tantangan Aspek Keterjangkauan	48
3. Tantangan Aspek Pemanfaatan	48
4. Tantangan Aspek Kelembagaan	49
III. RENCANA AKSI MULTI SEKTOR	50
A. Tujuan dan Sasaran (<i>Outcome</i>)	50
B. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	51
1. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG	51
2. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah dalam Situasi Darurat	52
a) Kebijakan Terkait Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan	52
b) Kebijakan terkait gizi dan kesehatan masyarakat	53
IV. KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI	54

A. Strategi dan Aksi.....	54
1. Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	54
2. Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	56
3. Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	57
4. Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.....	59
B. Pengorganisasian.....	61
C. Peran Sektor Non-Pemerintah	64
D. Pembiayaan.....	64
V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	65
A. Pemantauan dan Evaluasi.....	65
B. Pelaporan	65
VI. PENUTUP	66
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Produksi Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	13
Tabel 2. 2	Produksi Sayur dan Buah Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	14
Tabel 2. 3	Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	15
Tabel 2. 4	Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	15
Tabel 2. 5	Panjang Irigasi Tersier (dalam meter) Tahun 2022	16
Tabel 2. 6	Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul	16
Tabel 2. 7	Produksi Perikanan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	17
Tabel 2. 8	Pola Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020-2022	18
Tabel 2. 9	Analisis Surplus Defisit Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Bantul	19
Tabel 2. 10	Data Harga Bahan Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	22
Tabel 2. 11	Angka Kecukupan Energi dan Protein pada Tingkat Konsumsi Penduduk	25
Tabel 2. 12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	27
Tabel 2. 13	Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022	31
Tabel 2. 14	Prevalensi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	33
Tabel 2. 15	Prevalensi Balita Kurang Energi Protein (KEP) di Kabupaten Bantul	34
Tabel 2. 16	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul tahun 2018 - 2022	34
Tabel 2. 17	Jumlah dan Prevelensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	35
Tabel 2. 18	Jumlah dan Prevelensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2022 Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)	36
Tabel 2. 19	Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2022	36
Tabel 2. 20	Balita Gizi Lebih di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	36
Tabel 2. 21	Cakupan Kunjungan Neonatal di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	37
Tabel 2. 22	Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	38
Tabel 2. 23	Cakupan Bayi < 6 bulan yang Diberikan ASI Eksklusif di Kabupaten Bantul	39
Tabel 2. 24	Cakupan Pemberian Vitamin A di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	39
Tabel 2. 25	Ibu Hamil Mengalami KEK di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	39
Tabel 2. 26	Prevalensi Anemi Ibu Hamil di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	40
Tabel 2. 27	Ibu Hamil KEK Mendapat PMT di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	42
Tabel 2. 28	Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	43

Tabel 2. 29 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Terlindungi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	44
Tabel 2. 30 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2018 -2022	45
Tabel 2. 31 Data Penanganan RTLH Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022	46
Tabel 2. 32 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	47
Tabel 2. 33 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	47
Tabel 3. 1 Outcome RAD-PG Bantul Tahun 2023-2026	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Produksi Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022 ..	13
Gambar 2. 2 Produksi Sayur dan Buah Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	14
Gambar 2. 3 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul.	16
Gambar 2. 4 Produksi Perikanan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	17
Gambar 2. 5 Analisis Surplus Defisit Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Bantul.....	20
Gambar 2. 6 Alur Penjaminan Keamanan dan Kualitas pada Rantai Suplai Pangan.....	21
Gambar 2. 7 Data Harga Bahan Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	24
Gambar 2. 8 Angka Kecukupan Energi dan Protein pada Tingkat Konsumsi Penduduk.....	26
Gambar 2. 9 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	28
Gambar 2. 10 Sebaran Kasus Stunting.....	35
Gambar 2. 11 Puskesmas yang melaksanakan layanan PONEC dan difabel di Bantul.....	43

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan perkembangan, saat ini ketahanan pangan dan gizi tidak saja berorientasi pada pangan dan kesehatan, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas, sehingga memerlukan keterlibatan multisektor. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah hasil terbaru dari berbagai penelitian yang menunjukkan fokus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Meskipun fokus pada 1000 HPK, perbaikan pangan dan gizi pada periode selanjutnya tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan kekurangan gizi pada usia bayi dan balita mengakibatkan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik, meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular saat dewasa dan lansia, serta berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*), dan berkesinambungan (*sustainability*). Sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi

sebagai panduan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 63 ayat (3) menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Visi Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang terejawantahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, serta sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan pusat dan daerah, maka kedudukan RAD-PG di daerah sama halnya dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 di Pusat. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan juga RPJMD di daerah. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya dalam aspek pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di

lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

RAD-PG Kabupaten Bantul Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Kabupaten Bantul.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan umum dari penyusunan ini sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Kabupaten Bantul.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan dokumen RAD-PG Kabupaten Bantul tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.

3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik.
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi di Kabupaten Bantul.

D. Dasar Hukum Penyusunan RAD Pangan dan Gizi

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 142 ayat (5) yang menyebutkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya pasal 1 ayat (1) yang mengatur ketahanan pangan dan gizi serta Pasal 37 (ayat 1) yang mengatur tentang perbaikan Status Gizi masyarakat.
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

II. ANALISIS SITUASI

A. Situasi Saat ini

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 506,85 km² (sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat namun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	939.718	949.325	954.706	956.513	964.245
2	Pertumbuhan Penduduk	1,35	1,02	0,57	0,19	0,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2023

1. Bidang Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (UU No 18 Tahun 2012)

Produksi pangan di Kabupaten Bantul menjadi hal paling penting untuk diperhatikan karena menyangkut bahan makanan pokok masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

Terdapat 12 bahan pokok yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, daging sapi, daging dan telur ayam ras, gula konsumsi dan minyak goreng.

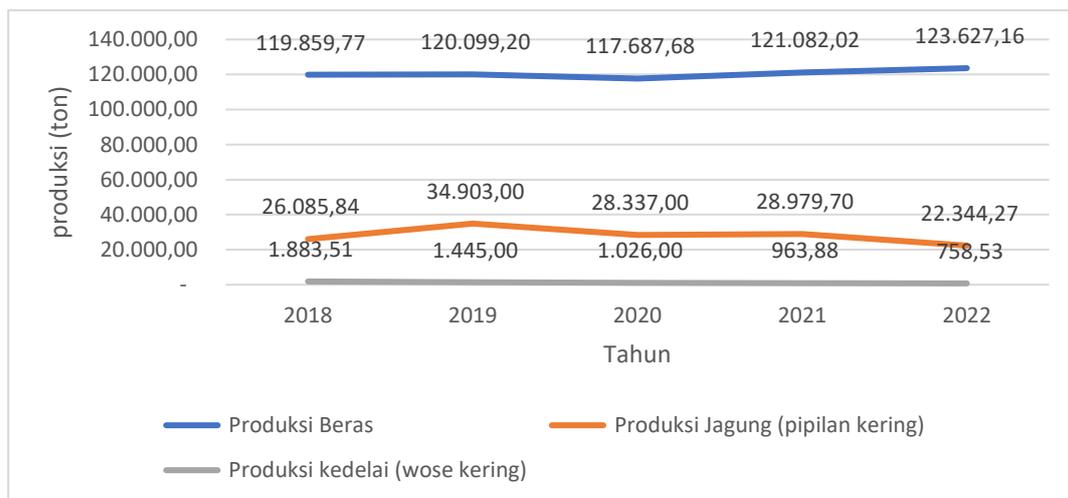
1) Produksi Pangan Utama

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai. Data produksi pangan utama dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2. 1 Produksi Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Komoditas	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan Geometrik
Produksi Beras	ton	119.859,77	120.099,20	117.687,68	121.082,02	123.627,16	0,0078
Produksi Jagung (pipilan kering)	ton	26.085,84	34.903,00	28.337,00	28.979,70	22.344,27	-0,0380
Produksi kedelai (wose kering)	ton	1.883,51	1.445,00	1.026,00	963,88	758,53	-0,2034

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023



Gambar 2. 1 Produksi Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Produksi beras pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2022 mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Sebaliknya pada produksi jagung dan kedelai justru mengalami penurunan terutama pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022 produksi beras Bantul mencapai 123.627,16 ton, jagung pipil kering mencapai 22.344,27ton dan kedelai mencapai 758,53 ton.

Penurunan produksi disebabkan adanya penurunan luas tanam dan penurunan produktivitas tanaman. Penurunan luas tanam disebabkan adanya alih fungsi lahan ke non pertanian dan pergeseran pada komoditas lain, sedangkan penurunan produktivitas disebabkan adanya cuaca ekstrim seperti hujan sepanjang tahun pada 2022, sehingga diperlukan irigasi yang baik agar air tidak tergenang, disamping itu penyaluran pupuk bersubsidi hanya 50% dari target yang disebabkan permasalahan Kartu Tani, pemanfaatan alat mesin pertanian yang tidak optimal, dan keterbatasan SDM

Penyuluh Pertanian dalam mendampingi kelompok tani, 85 penyuluh pertanian melayani 845 kelompok tani.

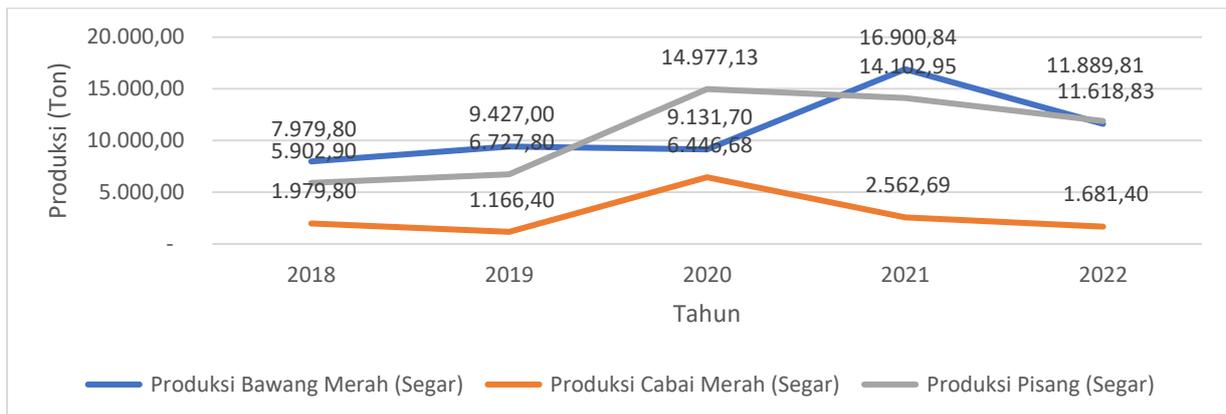
2) Produksi Sayur dan Buah Utama

Tanaman sayuran dan buah-buahan utama di Kabupaten Bantul adalah bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2. 2 Produksi Sayur dan Buah Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Komoditas	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan Geometrik
Produksi Bawang Merah (Segar)	Ton	7.979,80	9.427,00	9.131,70	16.900,84	11.618,83	0,0985
Produksi Cabai Merah (Segar)	Ton	1.979,80	1.166,40	6.446,68	2.562,69	1.681,40	-0,0400
Produksi Pisang (Segar)	Ton	5.902,90	6.727,80	14.977,13	14.102,95	11.889,81	0,1913

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023



Gambar 2. 2 Produksi Sayur dan Buah Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Produksi bawang merah, cabai merah, dan pisang pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2022 cukup fluktuatif, namun jika dilihat dari secara lebih detail, semua mengalami penurunan di tahun 2022. Pada tahun 2022 produksi bawang merah segar mencapai 11.618,83 ton, produksi cabai merah segar mencapai 1.681,40ton dan produksi pisang segar mencapai 11.889,81 ton.

3) Pengelolaan Irigasi

Pengelolaan irigasi dilaksanakan guna mewujudkan kemanfaatan air irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi bagi petani. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan

pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2018	96.724,00	81.122,42	83,87
2019	96.724,00	79.427,97	82,12
2020	96.724,00	79.724,50	82,42
2021	96.724,00	80.029,00	82,74
2022	96.724,00	79.626,00	82,32

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah 82,32% (79.626,00 m). Menurun 403 m dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2. 4 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2018	140.877,00	125.535,50	89,11
2019	140.877,00	115.761,25	82,17
2020	140.877,00	115.096,00	81,70
2021	140.877,00	111.974,00	79,48
2022	140.877,00	114.710,70	81,43

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah 81,43% (114.710,70 m). Meningkatkan 2.736,7 m dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2. 5 Panjang Irigasi Tersier (dalam meter) Tahun 2022

No.	Irigasi Tersier	Panjang Saluran Tersier (m)	Panjang Sudah Pasangan (m)	Panjang Belum Pasangan (m)
1	Kewenangan Kabupaten	25.411,22	22.429,96	2.981,25
2	Kewenangan Provinsi	145.657,24	103.600,28	42.056,96

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

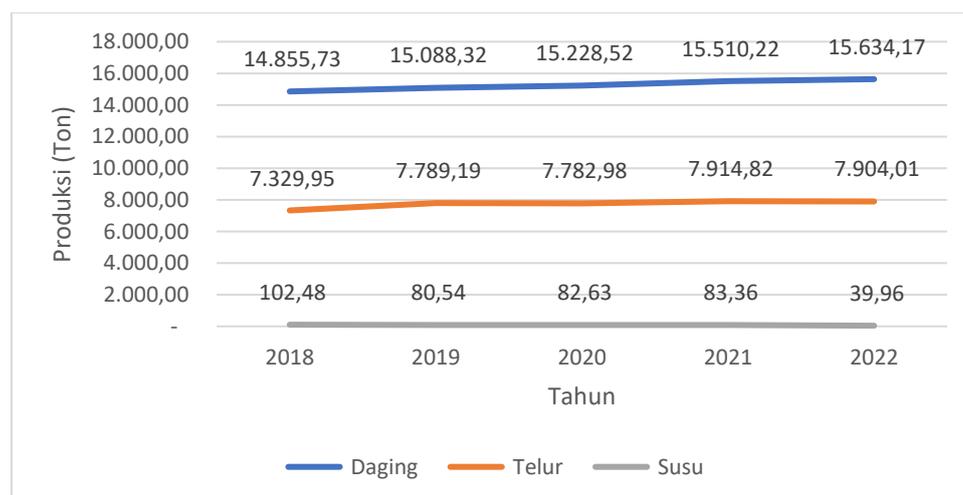
4) Produksi Pangan Hewani

Pangan hewani dipenuhi oleh daging, ikan, telur dan susu. Produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Komoditas	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan Geometrik
Daging	Ton	14.855,73	15.088,32	15.228,52	15.510,22	15.634,17	0,0129
Telur	Ton	7.329,95	7.789,19	7.782,98	7.914,82	7.904,01	0,0190
Susu	Liter/1.000	102,48	80,54	82,63	83,36	39,96	-0,2098

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023



Gambar 2. 3 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

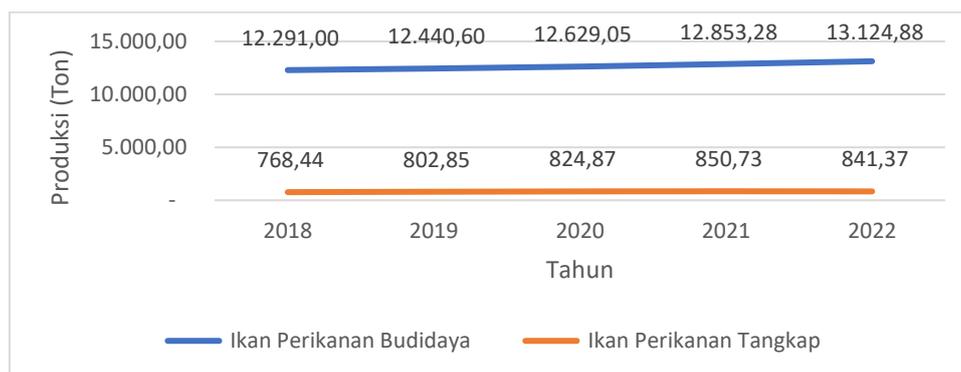
Produksi hasil peternakan secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2018–2022 terutama pada produksi daging dan telur. Pada tahun 2022 produksi daging mencapai 15.634,17ton dan telur mencapai 7.904,01 ton.

Produksi perikanan di Bantul berasal dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya yang berkembang berupa perikanan budidaya air tawar dan air payau, sedangkan perikanan tangkap dikategorikan kedalam 2 jenis, perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum. Aktivitas perikanan tangkap laut oleh nelayan berlangsung di pantai Bantul sepanjang 13,5 km hingga menjorok ke laut sepanjang 4 mil laut. Sedangkan aktivitas perikanan tangkap perairan umum berlangsung di sungai, muara, laguna, embung dan perairan lainnya yang ada di daratan.

Tabel 2. 7 Produksi Perikanan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Komoditas	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan Geometrik
Ikan Perikanan Budidaya	Ton	12.291,00	12.440,60	12.629,05	12.853,28	13.124,88	0,0165
Ikan Perikanan Tangkap	Ton	768,44	802,85	824,87	850,73	841,37	0,0229
Jumlah	Ton	15.077,44	15.262,45	15.473,92	15.725,01	15.988,25	0,0148

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2023



Gambar 2. 4 Produksi Perikanan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bantul secara umum mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya mencapai 12.124,88ton meliputi ikan

gurami, nila, lele, bawal, patin, mas, dan udang vanamei sedangkan produksi perikanan tangkap mencapai 841,17 ton.

5) Analisis Surplus dan Defisit terhadap produksi

Karakteristik konsumsi penduduk Bantul hampir sama dengan kabupaten/kota lain di D.I Yogyakarta. Konsumsi 9 jenis pangan penduduk di D.I. Yogyakarta dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Pola Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020-2022

Kelompok/Jenis Pangan	Kilogram Per Kapita Per Tahun		
	2020	2021	2022
1. Padi-Padian			
Beras	82,2	81,4	80,6
Jagung	1,4	0,7	0,7
Terigu	18,8	18,8	17,1
2. Umbi-umbian			
Singkong	8,3	11,4	10,9
Ubi Jalar	1,9	2,4	2,2
Kentang	2,7	2,9	3,2
Sagu	0,0	0,0	0,0
Umbi lainnya	0,1	0,2	0,3
3. Pangan Hewani			
Daging Ruminansia	6,9	5,5	5,4
Daging Unggas	11,0	10,8	11,1
Telur	7,9	8,5	9,2
Susu	3,7	3,5	3,4
4. Minyak dan Lemak			
Minyak Kelapa	0,4	0,3	0,1
Miinyak Lainnya	7,8	9,0	7,8
Margarin	1,0	1,1	1,0
5. Buah/Biji Berminyak			
Kelapa	1,5	1,7	1,5
Kemiri	0,2	0,2	0,2
Subtotal Buah/Biji Berminyak	1,6	1,9	1,7
6. Kacang-kacangan			
Kacang Kedelai	8,5	9,8	10,5
Kacang Tanah	0,5	0,3	0,3
Kacang Hijau	0,4	0,3	0,5
Kacang Lain	0,2	0,2	0,1
7. Gula			
Gula Pasir	7,4	8,0	7,2
Gula Merah	2,3	2,5	2,5
8. Sayur dan Buah			
Sayur	58,5	60,5	59,6
Buah	32,5	32,4	36,7
9. Lain-lain			
Minuman	38,8	27,8	25,5
Bumbu	2,1	2,4	2,8

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Pada tahun 2022 konsumsi beras adalah tertinggi mencapai 80,6kg/kapita/tahun, diikuti sayur mencapai 59,6kg/kapita/tahun dan buah mencapai 36,7kg/kapita/tahun. Sedangkan ikan mencapai 12kg/kapita/tahun, daging masih relative rendah yaitu daging unggas mencapai 11,1 kg/kapita/tahun dan daging ruminansia mencapai 5,4kg/kapita/tahun.

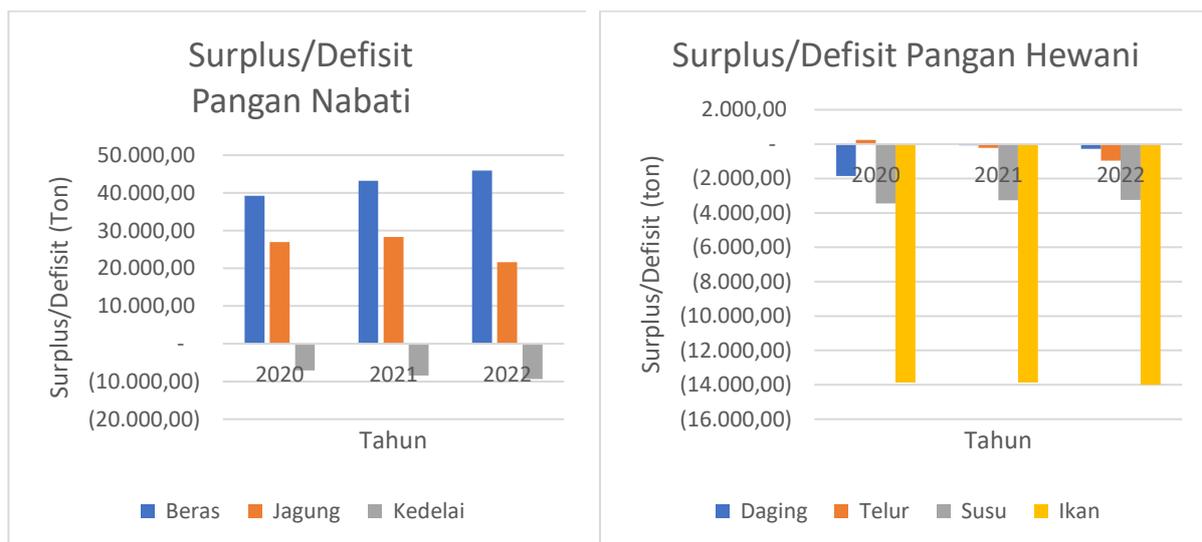
Untuk mengetahui adanya surplus atau defisit atas ketersediaan pangan utama Kabupaten Bantul, maka perlu dilakukan analisis surplus defisit yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9 Analisis Surplus Defisit Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

Uraian	Satuan	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	Jiwa	954.706	956.513	964.245
Pangan Nabati				
Beras				
Konsumsi/Kap/Th	Kg/Kap/Th	82,20	81,40	80,60
Konsumsi	Ton	78.476,83	77.860,16	77.718,15
Produksi	Ton	117.687,68	121.082,02	123.627,16
Surplus/Defisit	Ton	39.210,85	43.221,86	45.909,01
Jagung				
Konsumsi/Kap/Th	Kg/Kap/Th	1,40	0,70	0,70
Konsumsi	Ton	1.336,59	669,56	674,97
Produksi	Ton	28.337,00	28.979,70	22.344,27
Surplus/Defisit	Ton	27.000,41	28.310,14	21.669,30
Kedelai				
Konsumsi/Kap/Th	Kg/Kap/Th	8,50	9,80	10,50
Konsumsi	Ton	8.115,00	9.373,83	10.124,57
Produksi	Ton	1.026,00	963,88	758,53
Surplus/Defisit	Ton	- 7.089,00	- 8.409,95	- 9.366,04
Pangan Hewani				
Daging				
Daging Ruminansia	Kg/Kap/Th	6,9	5,5	5,4
Daging Unggas	Kg/Kap/Th	11,0	10,8	11,1
Daging	Kg/Kap/Th	17,90	16,30	16,50
Konsumsi	Ton	17.089,24	15.591,16	15.910,04
Produksi	Ton	15.228,52	15.510,22	15.634,17
Surplus/Defisit	Ton	- 1.860,71	- 80,94	- 275,88
Telur				
Konsumsi/Kap/Th	Kg/Kap/Th	7,9	8,5	9,2
Konsumsi	Ton	7.542,18	8.130,36	8.871,05
Produksi	Ton	7.782,98	7.914,82	7.904,01
Surplus/Defisit	Ton	240,80	- 215,54	- 967,04
Susu				
Konsumsi/Kap/Th	Liter/Kap/Th	3,7	3,5	3,4
Konsumsi	Liter/1000	3.532,41	3.347,80	3.278,43
Produksi	Liter/1000	82,63	83,36	39,96
Surplus/Defisit	Liter/1000	- 3.449,79	- 3.264,44	- 3.238,47

Uraian	Satuan	2020	2021	2022
Ikan				
Konsumsi/Kap/Th (Data DKP)	Kg/Kap/Th	30,74	30,93	31,1
Konsumsi	Ton	29.347,66	29.584,95	29.988,02
Produksi	Ton	15.473,92	15.725,01	15.988,25
Surplus/Defisit	Ton	- 13.873,74	- 13.859,94	- 13.999,77

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023



Gambar 2. 5 Analisis Surplus Defisit Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

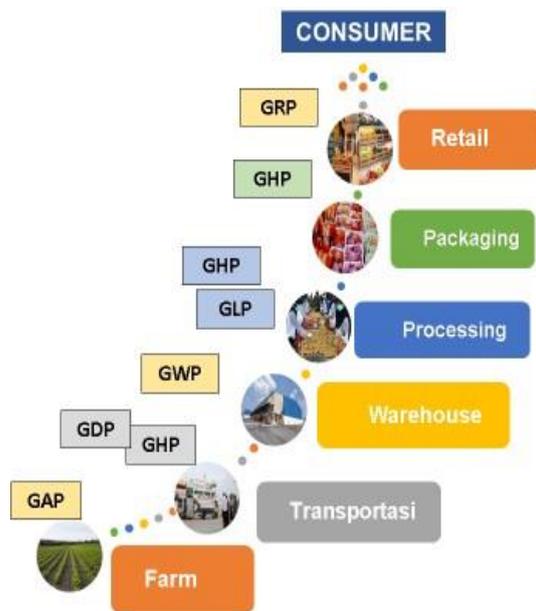
Dari analisis surplus/defisit di atas, dapat diketahui bahwa beras, jagung terdapat surplus, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar Kabupaten Bantul. Sedangkan pada komoditas kedelai, daging, telur, susu dan ikan mengalami defisit sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Bantul diperlukan masukan/impor dari luar daerah.

6) Keamanan Pangan

Keamanan pangan menjadi bagian penting dalam konteks ketahanan pangan. Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia penjaminan keamanan dan kualitas pangan dimulai sejak proses produksi di hulu sampai dengan pangan diterima konsumen.

Alur penjaminan keamanan pangan secara komprehensi disajikan pada Gambar di bawah ini.



- **GAP (Good Agriculture Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran selama masa budidaya atau panen/menangkap ikan/seafood.
- **GHP (Good Handling Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penanganan, pengangkutan dan penyusunan selama proses perpindahan, baik dari dan kedalam kendaraan, dari dan kedalam gudang.
- **GDP (Good Distribution Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran dari ketidaksesuaian proses penyaluran produk menurut kategori produk pangan dan persyaratan produk termasuk saluran pemasaran (*distribution channel*) dan rantai dingin (*Cold Chain*).
- **GWP (Good Warehouse Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penyimpanan di dalam gudang, seperti batas jumlah tumpukan, penyimpanan yang bersamaan dengan bahan kimia dan bahan berbahaya, suhu ruangan, dan lain sebagainya.
- **GRP (Good Retail Practices):** yaitu prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam tata cara penyusunan dan penyajian produk di retail (toko). Prosedur ini adalah pengembangan dari prosedur GWP.
- **GLP (Good Laboratory Practices):** Prosedur untuk mencegah terjadinya kesalahan analisa dalam proses pemeriksaan produk di laboratorium.

Gambar 2. 6 Alur Penjaminan Keamanan dan Kualitas pada Rantai Suplai Pangan

Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat

sehingga aman untuk dikonsumsi. Sedangkan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.

Salah satu upaya penjaminan keamanan pangan bagi masyarakat telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan melakukan uji laboratorium residu pestisida untuk sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah 70%.

b. Keterjangkauan Pangan

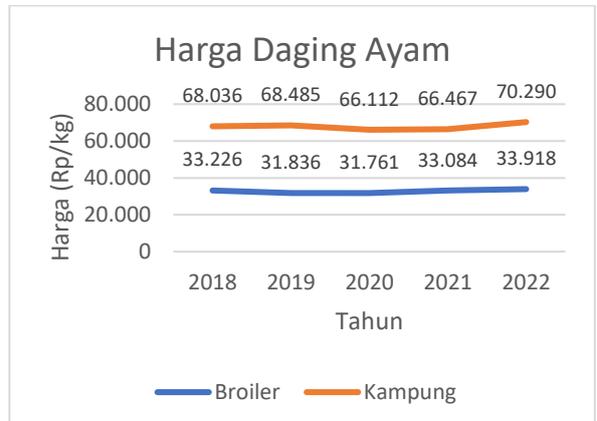
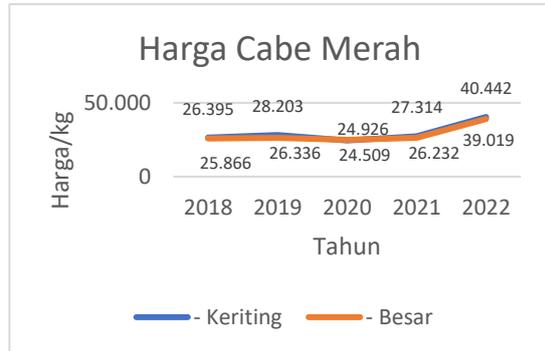
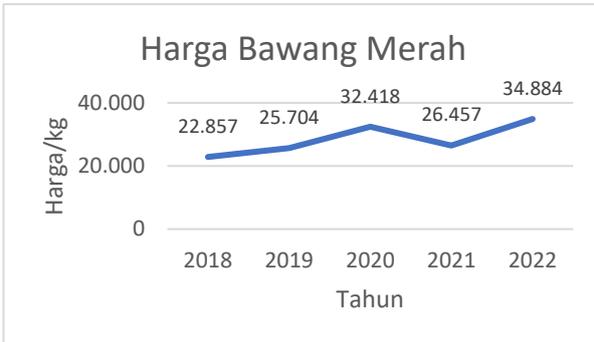
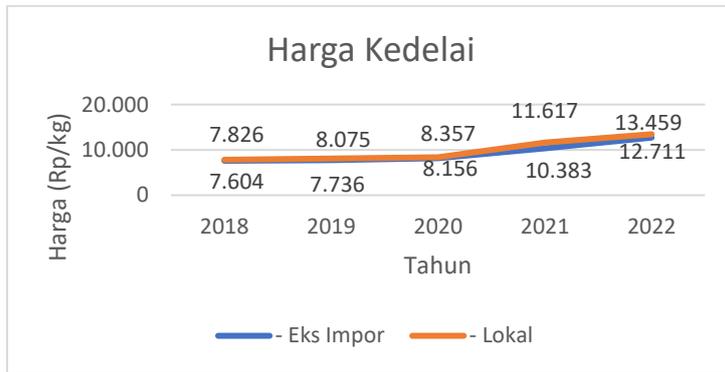
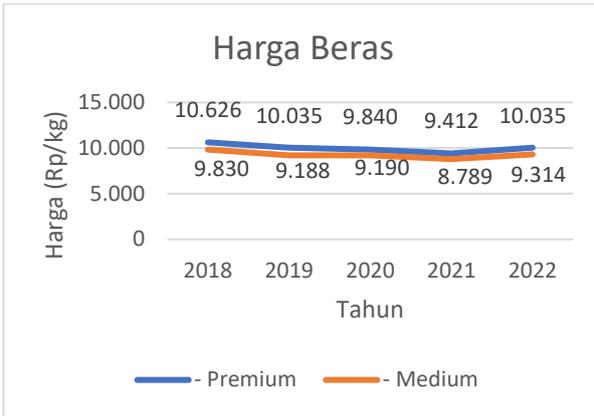
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan keterjangkauan adalah dengan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan Pokok. Data harga bahan pangan utama dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

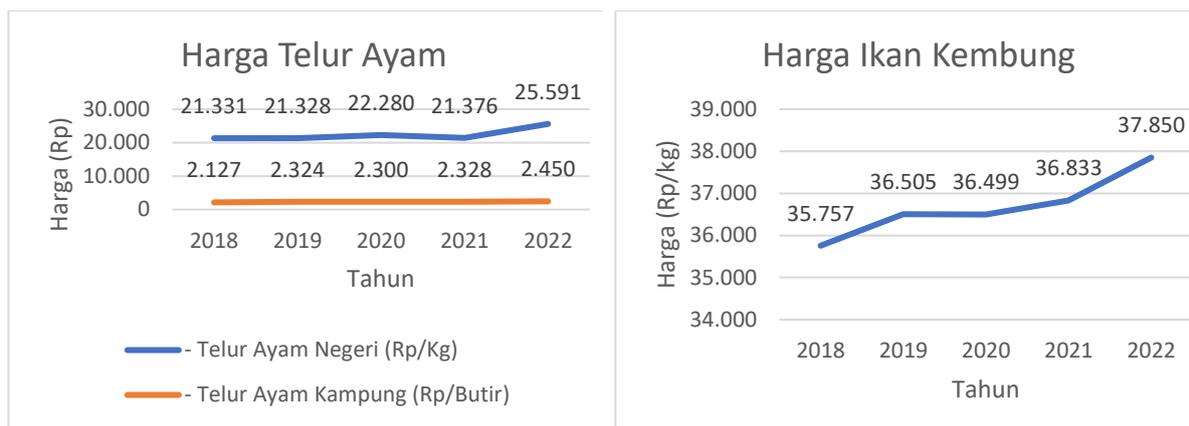
Tabel 2. 10 Data Harga Bahan Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beras						
- Premium	Kg	10.626	10.035	9.840	9.412	10.035
- Medium	Kg	9.830	9.188	9.190	8.789	9.314
Jagung Pipilan Kering	Kg	4.752	5.214	5.063	6.093	6.458
Kacang Kedelai						
- Eks Impor	Kg	7.604	7.736	8.156	10.383	12.711
- Lokal	Kg	7.826	8.075	8.357	11.617	13.459
Bawang Merah	Kg	22.857	25.704	32.418	26.457	34.884
Cabe Merah						
- Keriting	Kg	26.395	28.203	24.509	27.314	40.442
- Besar	Kg	25.866	26.336	24.926	26.232	39.019
Daging Sapi Murni						
- Has	Kg	115.316	120.258	121.940	124.795	131.702
- Rendang	Kg	106.985	106.478	107.722	112.337	119.235
Daging Ayam Broiler	Kg	33.226	31.836	31.761	33.084	33.918
Daging Ayam Kampung	Kg	68.036	68.485	66.112	66.467	70.290
Telur						
- Telur Ayam Negeri	Kg	21.331	21.328	22.280	21.376	25.591
- Telur Ayam Kampung	Butir	2.127	2.324	2.300	2.328	2.450
Ikan Kembung	Kg	35.757	36.505	36.499	36.833	37.850

Lokasi Sampling: Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Niten.

Sumber: DKUKMPP Kabupaten Bantul, 2023





Gambar 2. 7 Data Harga Bahan Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Dari data di atas dapat terlihat bahwa harga cenderung fluktuatif dan meningkat. Dalam 5 tahun terakhir harga beras pada kisaran Rp.9.412 sampai 10.035, harga jagung pada kisaran Rp.4.752,- sampai Rp,6.458,- harga kedelai lokal pada kisaran Rp.7.826,- sampai Rp.13.459,- lebih tinggi dari harga kedelai import, harga bawang merah pada kisaran Rp.22.857,- sampai Rp.34.884,- harga cabe merah pada kisaran Rp.24.926,- sampai Rp40.442,- lebih tinggi dari harga cabe merah besar. Harga daging sapi has pada kisaran Rp.115.316,- sampai Rp.131.702,- lebih tinggi dari harga daging sapi has, harga daging ayam kampung pada kisaran Rp.66.112,- sampai Rp.70.290,- lebih tinggi jika dibanding ayam broiller, harga telur ayam negeri pada kisaran Rp.21.328,- sampai Rp. 25.591,-. Harga ikan kembung pada kisaran Rp.35.757,- sampai Rp.37.850,-

c. Pemanfaatan Pangan

Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum, karena pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat esensial. Pemenuhan kecukupan pangan perseorangan merupakan esensi dari ketahanan pangan dan dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau harganya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) sebagai Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis padat potensi sumber daya lokal telah disepakati. Keragaman konsumsi pangan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kecukupan pangan dan gizi. Diversifikasi konsumsi pangan sangat berperan dalam kaitannya dengan aspek gizi, kesehatan, dan lebih jauh akan mempengaruhi kualitas SDM, baik menyangkut pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan maupun produktivitas kerja. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional.

1) Angka Kecukupan Energi dan Protein

Upaya perbaikan gizi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat. Acuan untuk merencanakan dan menilai pemenuhan konsumsi gizi seseorang disebut kebutuhan gizi (*nutrient requirement*), sedangkan acuan untuk merencanakan dan menilai konsumsi pangan kelompok orang atau masyarakat di suatu daerah/wilayah disebut kecukupan gizi (*nutrient allowances* atau *Recommended Dietary Allowances/RDA*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 Angka Kecukupan Energi (AKE) bagi penduduk Indonesia sebesar 2.150 kal/kap/hr pada tingkat konsumsi dan Angka Kecukupan Protein (AKP) bagi penduduk Indonesia sebesar 57 gr/kapita/hari pada tingkat konsumsi. Angka Kecukupan Energi dan Protein pada Tingkat Konsumsi Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

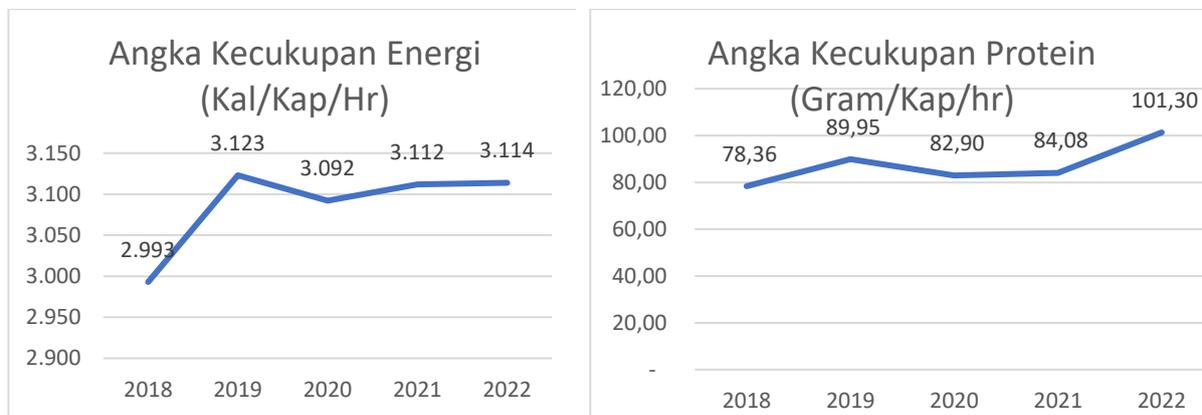
Tabel 2. 11 Angka Kecukupan Energi dan Protein pada Tingkat Konsumsi Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Protein (Gram/Kap/hr)		
		Nabati	Hewani	Total
2018	2.993	66,73	11,63	78,36
2019	3.123	75,10	14,86	89,95
2020	3.092	71,28	11,62	82,90

Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Protein (Gram/Kap/hr)		
		Nabati	Hewani	Total
2021	3.112	74,56	9,52	84,08
2022	3.114	74,50	28,80	101,30

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Energi pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung meningkat dan sudah di atas rata-rata Angka Kecukupan Energi penduduk Indonesia pada Tingkat konsumsi yaitu telah di atas 2.150kal/kapita/hari, Angka Kecukupan Protein pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung meningkat dan sudah di atas Angka Kecukupan Protein penduduk Indonesia pada Tingkat konsumsi yaitu telah di atas 57gram/kapita/hari



Gambar 2. 8 Angka Kecukupan Energi dan Protein pada Tingkat Konsumsi Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

2) Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu gizi dari keragaman konsumsi pangan (9 kelompok pangan) berdasarkan kontribusi asupan energi terhadap AKE. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup: (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

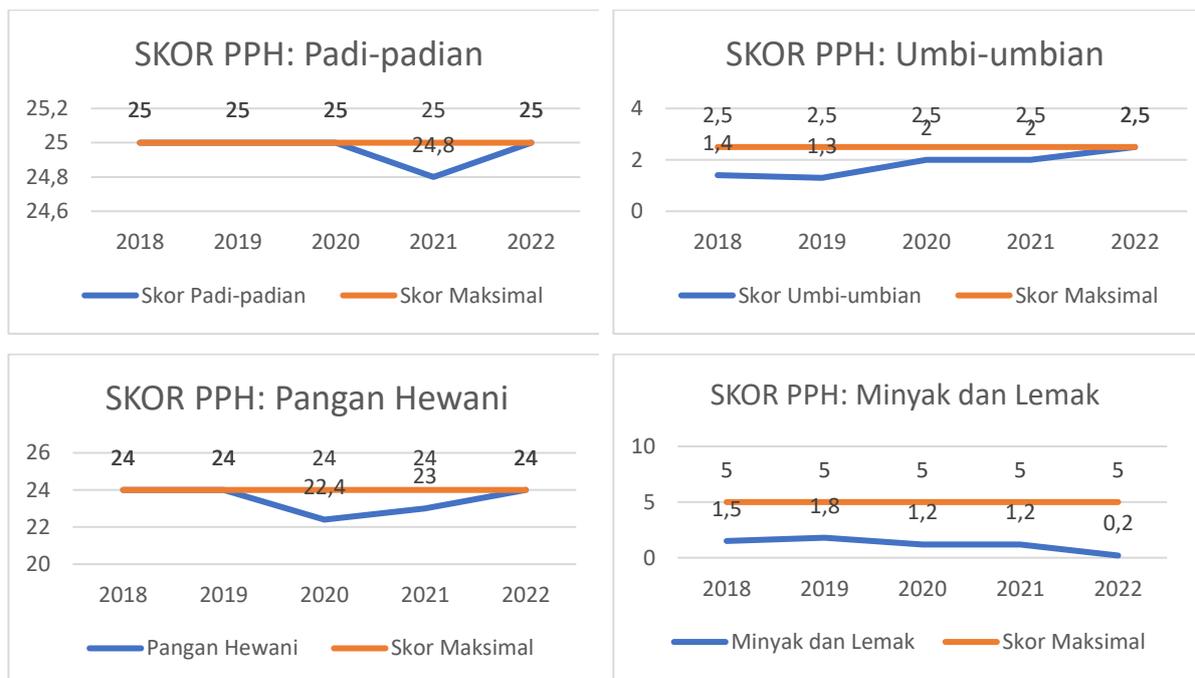
Skor PPH berkisar antara 0–100. Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan mutu gizi konsumsi pangan yang semakin baik. Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan

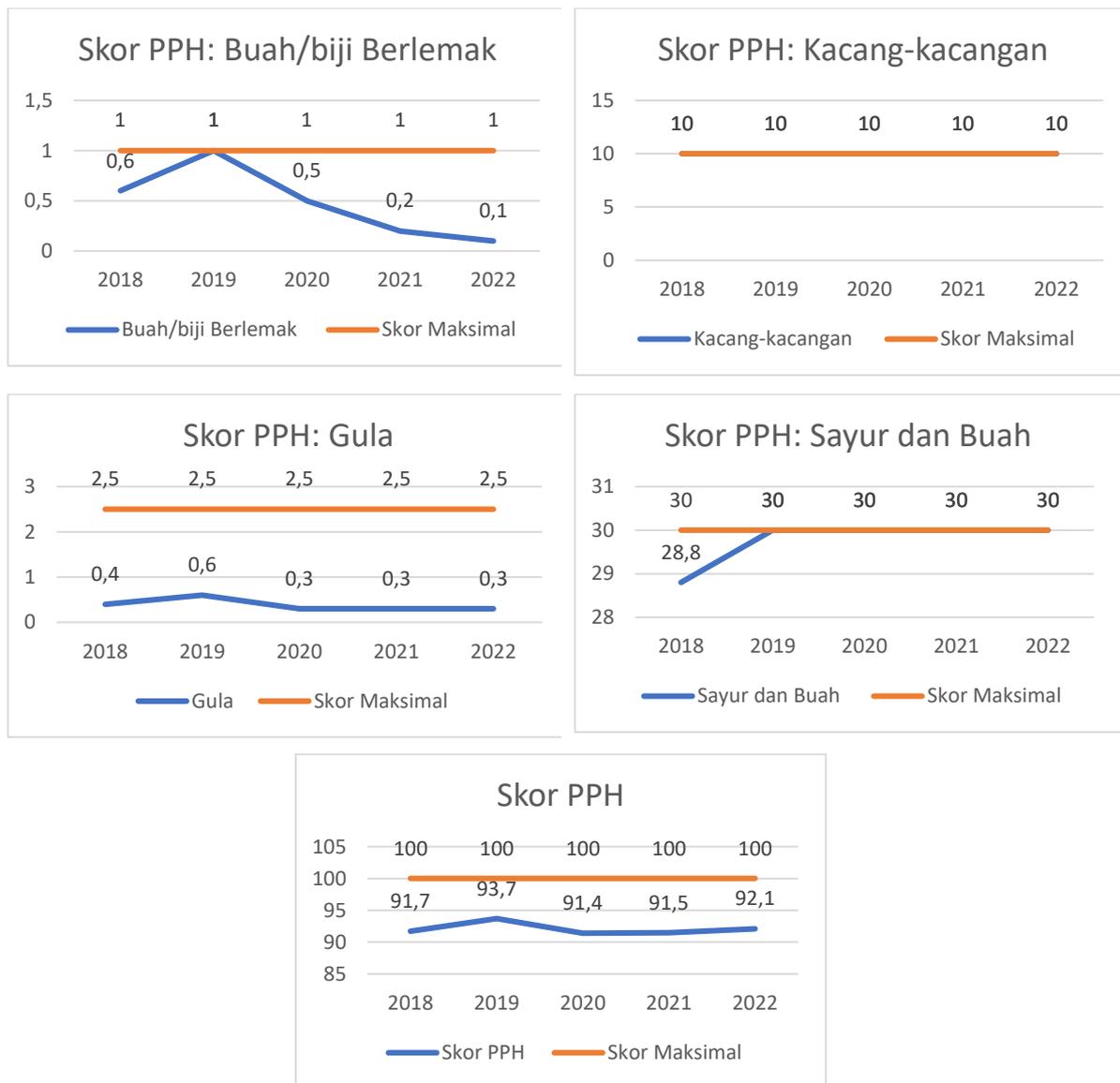
sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama.

Tabel 2. 12 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan					Skor Maks
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	24,8	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,4	1,3	2,0	2,0	2,5	2,5
3	Pangan hewani	24,0	24,0	22,4	23,0	24,0	24,0
4	Minyak dan lemak	1,5	1,8	1,2	1,2	0,2	5,0
5	Buah/biji berlemak	0,6	1,0	0,5	0,2	0,1	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	2,5
8	Sayur dan buah	28,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		91,7	93,7	91,4	91,5	92,1	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023





Gambar 2. 9 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

Dari data di atas dapat terlihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan secara keseluruhan di bawah 100, hal ini dipengaruhi kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula yang masih di bawah skor maksimum PPH, sedangkan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah sudah memenuhi skor maksimal Pola Pangan Harapan.

3) Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan

- **Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)**

Penyusunan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi berdasarkan pada 3 indikator yaitu: Ketersediaan Pangan dipengaruhi oleh Produksi, Jumlah Penduduk, dan Cadangan Pangan; Akses Pangan diperoleh dari jumlah keluarga prasejahtera; Pemanfaatan Pangan diperoleh dari data kekurangan energi protein (KEP).

Berdasarkan hasil analisis dan kajian kerawanan pangan/Situasi Pangan dan Gizi tahun 2022 di 75 kalurahan dan 17 kapanewon se Kabupaten Bantul, diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil Analisis Komposit Ketahanan Pangan (Tahunan), situasi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul untuk tingkat kapanewon, ada 2 kapanewon yaitu Pleret dan Pajangan memiliki Indek Ketahanan Pangan 2 atau waspada (wama kuning). Tingkat kalurahan ada 8 kalurahan yaitu Trimurti, Seloharjo, Selopamioro, Karangtengah, Segoroyoso, Bawuran, Sendangsari dan Guwosari yang memiliki Indek Ketahanan Pangan 2 atau waspada (wama kuning), sedangkan 67 kalurahan lainnya memiliki Indek Ketahanan Pangan (tahunan) 1 atau Aman (warna hijau).

- **Aspek Ketersediaan Pangan**

Terdapat 4 kapanewon yaitu Pleret, Banguntapan, Kasihan dan Pajangan yang memiliki skor 2 atau risiko pangan dan gizi waspada (warna kuning), sedangkan 13 kapanewon lainnya memiliki skor 1 atau risiko pangan dan gizi aman (warna hijau). Tingkat kalurahan ada 24 kalurahan yang memiliki skor 2 atau risiko pangan dan gizi waspada (warna kuning) yaitu kalurahan Trimurti, Seloharjo, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Wukirsari, Pleret, Segoroyoso, Bawuran, Tamanan, Jagalan, Singosaren, Wirokerten, Potorono, Baturetno, Banguntapan, Bangunharjo, Panggungharjo, Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamantirto, Ngestiharjo Sendangsari dan Guwosari. Sedangkan 51 kalurahan lainnya memiliki skor 1 atau risiko pangan dan gizi aman (warna hijau).

➤ Aspek Akses Pangan,

Tidak ada kapanewon yang memiliki skor 3 atau resiko pangan dan gizi rentan (warna merah). Namun demikian ada 8 kapanewon yaitu Srandakan, Sanden, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Dlingo, Pleret dan Pajangan yang memiliki skor 2 atau risiko pangan dan gizi waspada (warna kuning). Dilihat dari tingkat kalurahan ada 32 kalurahan yang memiliki skor 2 atau waspada (warna kuning) yaitu Poncosari, Trimurti, Gadingsari, Gadingharjo, Tirtomulyo, Seloharjo, Panjangrejo, Sidomulyo, Mulyodadi, Sumbermulyo, Caturharjo, Triharjo, Gilangharjo, Wijirejo, Canden, Selopamioro, Kebun Agung, Karangtengah, Mangunan, Muntuk, Dlingo, Temuwuh, Jatimulyo, Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo, Srimartani, Triwidadi, Sendangsari, Guwosari, Argodadi, dan Argosari.

➤ Aspek Pemanfaatan Pangan,

17 kapanewon semuanya memiliki skor 1 atau risiko pangan dan gizi aman (warna hijau), dan dari 75 kalurahan ada 1 kalurahan memiliki skor 2 atau risiko pangan dan gizi waspada (warna kuning) yaitu Selopamioro.

Penyebab adanya kondisi waspada (warna kuning) dari aspek ketersediaan dan akses pangannya, sedangkan dari aspek pemanfaatan pangan tidak bermasalah. Ketersediaan pangan sumber karbohidrat menurun, disebabkan penurunan produksi pangan sumber karbohidrat karena beralih ke komoditas hortikultura (bawang merah dan cabai). Untuk itu kalurahan Trimurti, Seloharjo, Selopamioro, Karangtengah, Segoroyoso, Bawuran, Sendangsari dan Guwosari perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan melalui program/kegiatan yang dapat meningkatkan ketersediaan dan akses pangan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi rentan pangan harapannya dari skor 2 atau waspada menjadi skor 1 atau aman (Warna hijau).

• **Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**

Penyusunan Peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) disusun berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

➤ Aspek Ketersediaan Pangan

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah Kalurahan dan Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

➤ Aspek Akses terhadap Pangan

Rasio jumlah penduduk dengan kesejahteraan rendah pada desil I dibanding dengan jumlah penduduk kalurahan; Kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara.

➤ Aspek Pemanfaatan Pangan

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kalurahan; Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kalurahan.

Kalurahan pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten Bantul tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13 Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

No	Desa Rentan Pangan	2019		2020		2021		2022	
		Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan
1	Prioritas 1	5	Selopamioro, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari Triwidadi	5	Selopamioro, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari, Triwidadi.	3	Jatimulyo, Sendangsari Triwidadi	1	Jatimulyo
2	Prioritas 2	2	Mangunan Dlingo	1	Dlingo	3	Selopamioro, Muntuk Dlingo	1	Dlingo
3	Prioritas 3	9	Seloharjo, Gilangharjo, Wukirsari, Temuwuh, Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo, Bangunharjo, Argodadi	12	Seloharjo, Triharjo, Sriharjo, Girirejo, Wukirsari, Mangunan, Temuwuh, Bawuran, Wonolelo, Bangunjiwo, Guwosari Argodadi.	5	Poncosari, Seloharjo, Triharjo, Wonolelo, Argodadi	5	Seloharjo, Kebonagung, Girirejo, Wonolelo dan Jagalan
Total		16		18		11		7	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kalurahan pada prioritas 1 (tingkat rentan pangan tinggi) menurun dari tahun 2019 s.d. 2022 dan pada Tahun 2022 tinggal 1 kalurahan saja. Sedangkan pada rentan pangan rendah (prioritas 3) terdapat 5 kalurahan pada Tahun 2022.

2. Bidang Gizi

a. Situasi Gizi Balita

1) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

BBLR adalah berat badan bayi saat lahir kurang dari 2.500 gram. Bayi dikatakan tidak BBLR jika saat lahir \geq 2.500 gram. BBLR berkaitan dengan Kesehatan Ibu saat hamil, bahkan jauh sebelum hamil atau masa remaja. Prevalensi BBLR di Kabupaten Bantul sedikit mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 14 Prevalensi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	3,8%	4,9%	5,6%	5,4%	5,6%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Kondisi bayi BBLR disebabkan oleh kondisi ibu saat hamil (kehamilan remaja, malnutrisi, dan komplikasi kehamilan), bayi kembar, janin memiliki kelainan atau kondisi bawaan, dan gangguan pada plasenta yang menghambat pertumbuhan bayi (*intrauterine growth restriction*). Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalan berat badan seiring dengan penambahan usia. Namun, bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk stunting dan mengidap penyakit tidak menular saat dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

2) Prevalensi Balita Kurang Energi Protein (KEP)

Kekurangan Energi dan Protein (KEP) merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Balita merupakan kelompok umur yang paling sering menderita kekurangan gizi dan gizi buruk. Manifestasi status gizi balita atau anak akibat Kekurangan Energi Protein (KEP) ini yaitu terjadinya gizi kurang atau berat badan kurang dan gizi buruk atau berat badan sangat kurang. Pemberian makanan tambahan penting untuk diberikan sesuai dengan usia anak supaya pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi optimal serta dengan status gizi yang baik.

Tabel 2. 15 Prevalensi Balita Kurang Energi Protein (KEP) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Balita Kurang Energi Protein (KEP)	8,46%	8,62%	7,91%	8,54%	10,99%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan fluktuatif, menurun di tahun 2020 dan meningkat lagi sampai dengan 2022.

3) Balita Gizi Buruk

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita yang diukur	48.943	48.502	18.621	47.788	55.256
Jumlah Balita Gizi Buruk	199	199	57	59	197
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,41%	0,41%	0,31%	0,12%	0,42%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan tren penurunan. Namun pada tahun 2022 tercatat adanya kenaikan kasus balita gizi buruk. Pada tahun 2022 prevalensi balita gizi buruk tercatat 0,42% atau 197 balita. Terjadi kenaikan kasus dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 0,12% atau 59 balita. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

4) Stunting

Stunted adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak yang ditandai dengan tinggi badan kurang dari standar (<-2 Z-Score WHO 2005). *Stunted* menjadi isu kesehatan masyarakat karena berdampak pada semua siklus kehidupan, sejak lahir hingga dewasa atau lansia. Pada umumnya *stunted* disertai dengan keterlambatan

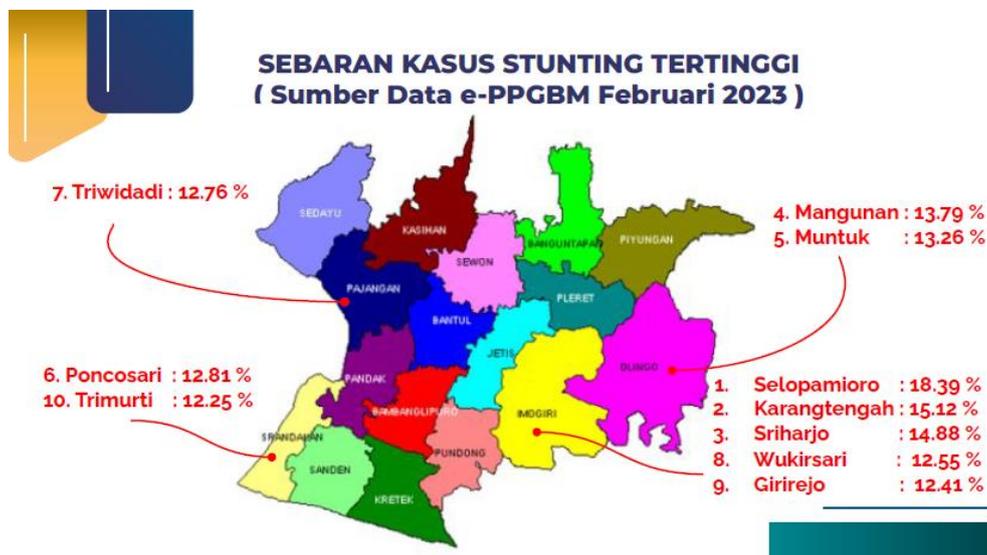
perkembangan pada setiap tahapan usia. Sehingga pada balita yang mempunyai riwayat malnutrisi kronis sejak kandungan yang ditandai dengan BBLR, lahir pendek, dan tetap tumbuh pendek pada usia kanak-kanak memerlukan stimulasi perkembangan yang lebih intensif.

Tabel 2. 17 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita yang Diukur	48.553	48.181	18.638	47.786	55.256
Jumlah Balita Stunting	4.733	3.725	1.816	3.996	3.001
Prevalensi Balita Stunting (%)	9,75%	7,73%	9,74%	8,36%	6,42%

Sumber : Dinas Kesehatan Bantul 2023, Penilaian Status Gizi, E-PPGM

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Prevalensi stunting berhasil diturunkan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 9,75% menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,73%. Namun angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Prevalensi stunting kembali turun ada tahun 2021 menjadi 8,36% dan tahun 2022 menjadi 6,42%. Adanya penurunan angka prevalensi stunting kembali pada tahun 2021 dan 2022 karena intervensi program percepatan penurunan stunting.



Gambar 2. 10 Sebaran Kasus Stunting

Sumber Data Stunting selain dari e-PPGBM, didapat juga dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan hasil seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18 Jumlah dan Prevelensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2022 Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Uraian	2021	2022
Prevalensi Balita Stunting Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) (%)	19,10%	14,90%

Sumber : Dinas Kesehatan Bantul 2023

Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 19 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Analisa Penyebab	Balita Stunting (%)
1	Keluarga Miskin	47,29
2	Usia Ibu<20	3,05
3	Usia Ibu>35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber: Dinas Kesehatan Bantul, 2023

5) Balita Gizi Lebih

Selain kurang gizi dalam bentuk *wasting* maupun *stunted*, gizi lebih merupakan ancaman permasalahan gizi yang harus mendapat perhatian. Menurut Riskesdas 2018, terdapat kecenderungan kenaikan prevalensi gizi lebih pada setiap kelompok umur termasuk balita.

Tabel 2. 20 Balita Gizi Lebih di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Balita Gizi Lebih	2,87%	3,06%	2,78%	3,20%	2,57%
Formulasi	BB/U	BB/U	BB/TB	BB/TB	BB/TB

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

b. Kesehatan Bayi dan Balita

Cakupan pelayanan kesehatan bayi meliputi pemberian imunisasi dasar BCG, DPTHB1-3, Polio 1-4, Campak, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang SDIDTK bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit sesuai MTBS, pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan. Indikator ini

mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

1) Kunjungan Neonatal (KN)

Kunjungan Neonatal (KN) adalah pelayanan sesuai standar yang diberikan tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatal. Menurut program kesehatan, pelayanan ini sedikitnya 3 (tiga) kali selama periode 0-28 hari setelah lahir, baik difasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah. Kunjungan Neonatal ke-1 (KN1) dilakukan pada kurun waktu 6 - 48 jam setelah lahir; KN2 pada kurun waktu hari 3 hari - 7 hari setelah lahir dan KN-3 hari 8 hari - 28 hari setelah lahir (Permenkes RI No 4 tahun 2019).

Kunjungan neonatal merupakan upaya ini untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian bayi baru lahir. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM), antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

Jumlah kunjungan neonatal di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 21 Cakupan Kunjungan Neonatal di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 (KN 1)	88,4 %	86,2%	86,0 %	83,9%	83,3%
Cakupan Kunjungan Neonatal 3 (KN 3)	86,5 %	84,1%	84,2 %	81,6%	81,9%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. Beberapa manfaat IMD di antaranya, mengurangi angka kematian bayi, membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil, bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya, dan merangsang pengaliran ASI dari payudara.

Inisiasi Menyusu Dini juga akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui.

IMD sangat membantu keberhasilan dan kelangsungan pemberian ASI eksklusif hingga pemberian ASI hingga balita berumur 2 tahun. Pengenalan dini menyusui akan membantu dalam membangun usus bayi yang steril secara alami untuk berkoloni dengan mikroorganisme yang aman dan juga organisme ibu, daripada berkoloni dengan organisme di kamar bayi rumah sakit dan pengasuh lainnya.

Tabel 2. 22 Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bayi Dapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	11.456	11.226	10.953	9.897	9.045
Prevalensi Bayi Dapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	88,67%	85,88%	86,32%	84,14%	83,03%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI (Air Susu Ibu) adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir, yang mana ASI ini bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Dalam fase ini harus diperhatikan dengan benar mengenai pemberian dan kualitas ASI, supaya tak mengganggu tahap perkembangan si kecil selama enam bulan pertama semenjak hari pertama lahir (HPL), mengingat periode tersebut merupakan masa periode emas perkembangan anak sampai menginjak usia 2 tahun.

Pemberian ASI merupakan landasan kelangsungan hidup anak, nutrisi dan perkembangan serta kesehatan ibu. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, dan dilanjutkan dengan pemberian ASI dan makanan pendamping yang sesuai hingga 2 tahun atau lebih.

Tabel 2. 23 Cakupan Bayi < 6 bulan yang Diberikan ASI Eksklusif di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Bayi < 6 bulan yang Diberikan ASI Eksklusif	77,74%	78,96%	82%	80,8%	83,3%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

3) Pemberian Vitamin A

Suplementasi vitamin A dosis tinggi diberikan setahun 2 kali, yakni bulan Februari dan Agustus. Balita >6 bulan hingga 11 bulan diberi vitamin A 100.000 IU (warna biru) dan balita 12-60 bulan diberi vitamin A 200.000 IU (warna merah). Vitamin A diberikan untuk mencegah rabun senja, mencegah infeksi, meningkatkan nafsu makan balita, mengurangi risiko sakit dan kematian dini, serta mendukung pertumbuhan tinggi badan anak.

Tabel 2. 24 Cakupan Pemberian Vitamin A di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Pemberian Vitamin A (bayi)	99,96%	99,98%	99,7%	100%	99,8%
Cakupan Pemberian Vitamin A (balita)	100%	100%	99,8 %	100%	99,4%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

c. Kesehatan Ibu Hamil

1) Ibu Hamil Mengalami Kurang Energi Kronis (KEK)

Kesehatan ibu merupakan faktor penting terhadap outcome kehamilan. Permasalahan Bumil KEK merupakan permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan yang lebih baik, mengingat status kesehatan ibu hamil sangat menentukan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2. 25 Ibu Hamil Mengalami KEK di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Hamil yang di periksa	14.403	14.892	13.239	13.102	12.624
Jumlah Ibu Hamil Mengalami Kurang Energi Kronis (KEK)	1.410	1.588	1.407	1.421	1.528
Persentase Ibu Hamil Mengalami Kurang Energi Kronis (KEK)	9,79%	10,66%	10,63%	10,85%	12,10%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yang dilahirkan. Kondisi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan perdarahan pasca salin, bahkan kematian ibu. Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadi kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) bahkan kematian bayi. Salah satu upaya yang dilakukan pada ibu hamil KEK berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan. PMT bukan berarti mengganti asupan dari makanan utama, tetapi menambah asupan kebutuhan gizi. Pada tahun 2022 terdapat Ibu hamil dengan status KEK sebanyak 1.528 (12.1%) ibu hamil dari 12.529 ibu hamil yang diperiksa.

2) Prevalensi Anemia

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi pada semua kelompok umur mulai dari balita sampai usia lanjut. Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Menurut WHO, ibu hamil mempunyai risiko anemia. Hal ini berkaitan dengan outcome kehamilan yang buruk seperti BBLR, bayi yang dilahirkan anemi, kelahiran premature dan kematian ibu.

Tabel 2. 26 Prevalensi Anemi Ibu Hamil di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Anemi Ibu Hamil	15,18%	17,13%	16,86%	18,99%	15,89%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah 83,1%. Capaian ini menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yakni 84%.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun.

Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia dikarenakan siklus menstruasi setiap bulan. Anemia dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan produktivitas. Anemia yang terjadi pada rematri juga dapat berisiko pada saat hamil dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Penanganan dan pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menunjang pembentukan sel darah merah sebagai pencegahan, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi. Konsumsi makanan beraneka ragam dan kaya akan zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C seperti yang terdapat pada hati, daging, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau gelap, buah-buahan, dsb. Namun tidak semua Masyarakat dapat mengonsumsi makanan tersebut, sehingga diperlukan asupan zat besi tambahan yang diperoleh dari tablet tambah darah (TTD).

Cakupan pemberian TTD pada remaja putri di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 adalah 75.69%. Puskesmas dengan persentase tertinggi cakupan pemberian TTD pada remaja putri terdapat di 12 Puskesmas, sedangkan persentase terendah adalah Puskesmas Banguntapan II (28,96%).

3) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- **Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK**

Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yang dilahirkan. Kondisi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan perdarahan pasca salin, bahkan kematian ibu. Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadi kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) bahkan kematian bayi. Salah satu upaya yang dilakukan pada ibu hamil KEK berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan. PMT bukan berarti mengganti asupan dari makanan utama, tetapi menambah asupan kebutuhan gizi.

Pemerintah melalui kementerian kesehatan telah melakukan upaya untuk penanggulangan KEK pada ibu hamil melalui pemberian PMT.

Tabel 2. 27 Ibu Hamil KEK Mendapat PMT di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

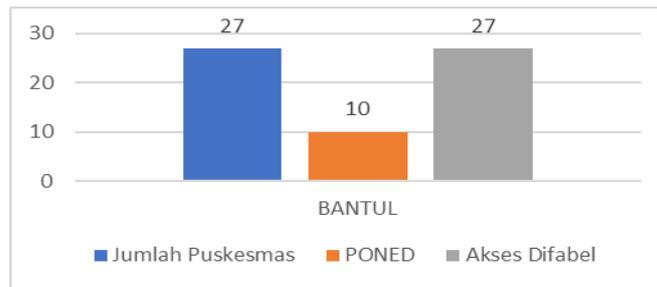
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Ibu Hamil KEK Mendapat PMT	100%	100%	98,22%	100%	99,87%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

- **Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil, pelayanan**

- Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan difabel**

Semua Puskesmas (100%) di Bantul sejak 2016 mengadakan program kelas ibu hamil. Selain itu, semua Puskesmas di Bantul (27 puskesmas) memberikan layanan/dapat diakses oleh kaum difabel. Sementara 10 puskesmas melaksanakan layanan PONED. Layanan PONED merupakan layanan yang disediakan oleh Puskesmas rawat inap terkait kasus emergensi obstetric dan neonates tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.



Gambar 2. 11 Puskesmas yang melaksanakan layanan PONEC dan POF di Bantul
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

• **Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A**

Ibu nifas yang mendapatkan vitamin A di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 99,05%. Vitamin A pada ibu nifas sangat bermanfaat untuk mencegah infeksi pada bayi dan ibu pada masa post-partum, meningkatkan daya tahan tubuh, menyediakan supply vitamin A bagi bayi melalui ASI, mensupport kerja hormon utamanya growth hormone yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak yang optimal.

Tabel 2. 28 Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	99,04%	99,78%	98,7%	98,86%	99,05%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

d. Kesehatan Lingkungan, Pemukiman dan Sanitasi

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperbaiki kesehatan lingkungan merupakan metode yang mempunyai daya ungkit besar. Lingkungan merupakan faktor penting bagi kesehatan, karena derajat Kesehatan merupakan akibat dari bekerjanya faktor lingkungan dimana manusia lahir, hidup, tumbuh dan bekerja.

1) Akses Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.

Salah satu fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya sarana air bersih khususnya yang digunakan untuk minum dan memasak. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi kesehatan. Sumber air yang terlindung menyediakan air yang aman untuk diminum sehingga tidak menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Air minum dan air untuk memasak yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumber bor/ pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter.

Tabel 2. 29 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Terlindungi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Terlindungi	76,61	97,14	98,09	97,03	97,88

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 jika dilihat dari fasilitas sumber air minum dapat diketahui sebanyak 45,23 persen rumah tangga menggunakan air minum yang berasal dari air sumur/ mata air terlindung, sebanyak 22,99 persen menggunakan air minum dari sumur bor/pompa, 22,13 persen menggunakan air minum dari air kemasan/isi ulang, 7,53 persen menggunakan air ledeng dan 2,12 persen masih menggunakan sumber air minum dari sumur/marta air tidak terlindung.

Akses air minum layak di Kabupaten Bantul dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah melalui jaringan PDAM, membangun instalasi Sistem

Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih.

2) Pemukiman

• Penanganan Kawasan Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha, mencakup 4 kapanewon Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Banguntapan, Kasihan, Sewon, dan Bantul.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil *review* ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Ha, mencakup 7 (tujuh) kapanewon, yaitu Sewon, Kasihan, Banguntapan, Bantul, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan. Selengkapnya, data penanganan Kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 30 Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2018 -2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas kawasan kumuh(ha)	79,58	79,58	79,58	330,26	330,26
Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	73,26	73,60	73,60	122,30	147,72
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	92,06	92,49	92,49	37,03	44,72
Dasar Peraturan	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016			SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

- **Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 056/PERKIM-648/2020 tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul terdapat 6.381 unit RTLH di Kabupaten Bantul. Berbagai upaya dalam rangka penanganan dan peningkatan kualitas RTLH telah dilakukan. Pada tahun 2022 sebanyak 3.746 unit RTLH atau 58,70% dari total 6.381 unit telah ditangani baik melalui pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Data penanganan RTLH Tahun 2020-2022 di Kabupaten Bantul tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31 Data Penanganan RTLH Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022

RTLH	Tahun Penanganan			Total Penanganan RTLH	RTLH tersisa
	2020	2021	2022		
6.381	1.715	1.420	609	3.746	2.635

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

3) Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Manfaat sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman. Permasalahan sanitasi harus segera ditangani dengan lebih optimal terutama permasalahan air limbah, drainase dan persampahan.

Pengelolaan air limbah sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 32 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
		Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
1	2018	124	10633	1	2389
2	2019	130	11013	1	2509
3	2020	140	11663	1	2899
4	2021	144	11919	2	3124
5	2022	151	12304	2	3448

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 adalah 97,19%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 33 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	97,19	98,35	99,5	97,19	97,19*

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Ket: * data Sementara

B. Tantangan

Analisis situasi di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

1. Tantangan Aspek Ketersediaan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, luas panen komoditas unggulan mengalami penurunan cukup signifikan. Terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain, berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian, Diperlukan percepatan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan regulasi turunannya agar alih fungsi lahan bisa dikendalikan dan luas lahan pertanian tetap terjaga. Produktivitas pada beberapa komoditas unggulan juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya cuaca ekstrim seperti hujan sepanjang tahun pada 2022, sehingga diperlukan prasarana irigasi yang baik agar air tidak tergenang, disamping itu sarana produksi yang cukup dan tepat waktu.

2. Tantangan Aspek Keterjangkauan

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan keterjangkauan adalah dengan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Harga pangan pokok akhir-akhir ini cenderung fluktuatif dan beberapa harga komoditas lain harga cenderung meningkat. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara supply dan demand.

3. Tantangan Aspek Pemanfaatan

Pola konsumsi sebagian besar masyarakat masih kurang ideal, jika dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan, kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula yang masih di bawah skor maksimum PPH, sedangkan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah sudah memenuhi skor maksimal PPH.

Situasi Gizi pada Balita menunjukkan bahwa tahun 2022 Prevalensi Berat Badan Lahir Rendah meningkat menjadi 5,7%, Prevalensi Balita Kurang Energi Protein (KEP) meningkat menjadi 10,99%, Prevalensi Balita Gizi Buruk meningkat menjadi 0,42%. Sebaliknya pada Prevalensi Balita

Stunting (%) menurun menjadi 6,42% dan Balita dengan Gizi Lebih menurun menjadi 2,57%.

Pada ibu hamil, Persentase Ibu Hamil Mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) meningkat menjadi 12,10%.

4. Tantangan Aspek Kelembagaan

Forum koordinasi RAD-PG Kabupaten Bantul baru terbentuk yang bertugas melakukan penyusunan RAD-PG, mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah, mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG, menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan, mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masih minimnya pelibatan stakeholder non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi.

III. RENCANA AKSI MULTI SEKTOR

A. Tujuan dan Sasaran (*Outcome*)

Outcome yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Outcome RAD-PG Bantul Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					Instansi
			2022	2023	2024	2025	2026	Penanggung-jawab	
	Outcome Antara								
1.	Ketersediaan Beras	Ton	123.627	123.627	123.627	123.627	123.627	123.627	DKPP
2.	Ketersediaan Pangan Hewani	Ton	15.634	15.588	15.713	15.850	15.961	15.961	DKPP
3.	Skor Pola Pangan harapan	Angka	92,10	90,80	91,00	91,20	91,20	91,20	DKPP
4.	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/hari	3.114	2.780	2.785	2.790	2.795	2.795	DKPP
5.	Ketersediaan Protein	Gram/kapita/hari	101,30	70,00	71,00	72,00	73,00	73,00	DKPP
6.	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	22,67	21,33	20,00	18,67	17,33	17,33	DKPP
7.	Konsumsi ikan	(kg/kapita/tahun)	31,10	31,30	31,50	31,70	31,90	31,90	DKP
8.	Konsumsi daging	(kg/kapita/tahun)	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	DKPP
9.	Konsumsi protein asal ternak (telur dan susu)	(gram/kapita/hari)	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	DKPP
10.	Konsumsi sayur dan buah	(gram/ kapita/hari)	263,90	263,90	263,90	263,90	263,90	263,90	DKPP
11.	Persentase makanan memenuhi syarat	Persen	82	84	86	86	86	86	BPOM
	Outcome								
1.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	6,42	8,75	8,50	8,00	7,75	7,75	DINKES
2.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Persen	4,39	4,38	4,37	4,36	4,35	4,35	DINKES
3.	Prevalensi obesitas pada balita	Persen	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50	DINKES

Catatan:

Baseline adalah capaian 2022

Target adalah target di Renstra PD yang penetapannya sesuai perodesasi RPJMD 2021-2026

B. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

1. Pengarusutamaan Gender dalam RAD Pangan dan Gizi

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan Gender sangat berperan dalam hal ketersediaan pangan dan gizi.

Beban ganda perempuan pekerja dan belum setaranya proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi masalah gender yang mengedepan. Namun demikian di lain sisi peran yang dilekatkan kepada perempuan sebagai penanggungjawab urusan domestik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian keluarga (termasuk kebutuhan pangan) dan pengasuhan anak menempatkan posisi dan peran perempuan menjadi sangat penting di suatu keluarga. Penguatan fungsi keluarga didorong untuk membangun relasi yang setara baik laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sebagai fondasi membangun norma adil gender di masyarakat. Penguatan fungsi keluarga dibarengi dengan pendidikan kesetaraan gender bagi keluarga melalui kelembagaan yang sudah ada seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), keluarga sadargender, Dasa wisma, PKK, desa prima, P2WKSS, dan sebagainya.

Dalam bidang ketahanan pangan dan gizi, pengarusutamaan gender dapat berupa memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas dan peran, memilih bidang pekerjaan yang sesuai sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam keluarga merupakan potensi peluang yang baik untuk dapat menyiapkan gizi bagi keluarganya melalui pemanfaatan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, peningkatan ketrampilan untuk mengelola gizi, kesehatan maupun kebutuhan lain yang mendukung terciptanya kesejahteraan keluarga.

2. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah dalam Situasi Darurat

a) Kebijakan Terkait Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) dihitung dari jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan. Jumlah cadangan pangan terdiri dari jumlah cadangan pangan pemerintah serta jumlah cadangan pangan masyarakat yang terdiri dari stok pangan di lumbung pangan masyarakat dan 10% jumlah produksi beras. Sedangkan jumlah kebutuhan pangan terdiri dari kebutuhan per kapita dikalikan jumlah penduduk. Penyebab adanya kondisi waspada (warna kuning) dari aspek ketersediaan dan akses pangannya, sedangkan dari aspek pemanfaatan pangan tidak bermasalah. Ketersediaan pangan sumber karbohidrat menurun, disebabkan penurunan produksi pangan sumber karbohidrat karena beralih ke komoditas hortikultura (bawang merah dan cabai). Untuk itu kalurahan Trimurti, Seloharjo, Selopamioro, Karangtengah, Segoroyoso, Bawuran, Sendangsari dan Guwosari perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan melalui program/kegiatan yang dapat meningkatkan ketersediaan dan akses pangan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi rentan pangan harapannya dari skor 2 atau waspada menjadi skor 1 atau aman (Wama hijau).

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam merepson situasi kegawatdaruratan antara lain:

- Pengembangan kelompok-kelompok lumbung pangan baik kelompok yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah maupun kelompok-kelompok lumbung swadaya.
- Pengadaan Desa Mandiri Pangan yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara keberlanjutan

b) Kebijakan terkait gizi dan kesehatan masyarakat

- Sosialisasi tentang pola asuh anak yang tepat
- Pemenuhan kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun
- Kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting
- Peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan
- Konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting
- Pendampingan balita stunting oleh kader

IV. KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

A. Strategi dan Aksi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Berdasarkan rekomendasi di atas, maka disusun strategi dan aksi di bidang pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

- 1.1. Peningkatan produksi pangan yang beragam
 - a. Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
 - b. Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kabupaten/kota
 - c. Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan
 - d. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
 - e. Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan gizi keluarga

- 1.2. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)
 - a. Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan
 - b. Memperkuat kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan
 - c. Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan
 - d. Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan
 - e. Penguatan kapasitas IKM dan UMKM olahan pangan dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan
- 1.3. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat
 - a. Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota
 - b. Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)
- 1.4. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen
 - a. Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss
 - b. Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait
 - c. Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian food loss
 - d. Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss
- 1.5. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi
 - a. Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan

2. Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

- 2.1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan.
 - a. Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan
 - b. Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
- 2.2. Perluasan akses system informasi pasar dan harga pangan.
 - a. Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
 - b. Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
- 2.3. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan
 - a. Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan
- 2.4. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam
 - a. Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - b. Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas BPNT/Program Sembako
 - c. Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)
- 2.5. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat
 - a. Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan

- pangan lokal di daerah masing-masing
- b. Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
- 2.6. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana
- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal
 - b. Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi
- 2.7. Pengembangan system logistic pangan
- a. Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan *supply chain ecosystem* berdasarkan kondisi daerah

3. Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

- 3.1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
- a. Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya
- 3.2. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;
- a. Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan
- 3.3. Edukasi pola konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
- a. Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan
 - b. Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik
 - c. Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan

- d. Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas
 - e. Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%
 - f. Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku
 - g. Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA
 - h. Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik, dan deteksi dini
 - i. Melakukan orientasi agent of change pencegahan penyakit tidak menular (PTM)
 - j. Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
- 3.4. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
- a. Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah
- 3.5. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
- a. Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota
- 3.6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan

pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;

- a. Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI
- b. Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal

3.7. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;

- a. Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024
- b. Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat
- c. Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM
- d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa

3.8. Pengendalian pemborosan pangan (food waste);

- a. Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi *food waste*
- b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- c. Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste

3.9. Fortifikasi pada pangan tertentu;

- a. Mendorong peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat

3.10. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

- a. Mendorong peningkatan produk pangan olahan bersertifikat

4. Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

4.1. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dan gizi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan;

- a. Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan *stunting*
- 4.2. Penguatan peran sekteon non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
 - a. Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam *scaling up* program pangan dan gizi di pusat dan daerah
 - b. Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, *food loss* dan *food waste*.
- 4.3. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi;
 - a. Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah
 - b. Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
 - c. Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini
- 4.4. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi;
 - a. Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
 - b. Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi
- 4.5. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.
 - a. Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga

Aksi pada masing-masing Tujuan Strategi memiliki indikator dan capaian target selama Tahun 2024-2026. Indikator tersebut diampu oleh Perangkat Daerah dengan rincian tersaji dalam lampiran dokumen ini. Adapun jumlah indikator pada tiap perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2 Indikator RAD-PG Bantul pada Stakeholder Terkait Tahun 2024-2026

No	Penanggung Jawab	Tujuan Strategi 1	Tujuan Strategi 2	Tujuan Strategi 3	Tujuan Strategi 4	Jumlah
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)			2	6	8
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)	27	16	9	2	54
3	Dinas Kesehatan (DINKES)			17	1	18
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP)	4	7	2		13
5	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)			6		6
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)	3			2	5
7	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	3		1		4
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal)		2	1		3
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKPORA)			2		2
10	Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO)			2		2
11	Dinas Sosial (DINSOS)		2			2
12	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)			2		2
13	Bagian Kesejahteraan Rakyat (BAG. KESRA- SETDA)				2	2
14	Badan Urusan Logistik (BULOG)		1			1
15	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	1		2		3
16	Kementerian Agama (KEMENAG)			3		3
17	Kementerian Sosial (KEMENSOS)		3			3
18	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)			5		5
	Jumlah	38	31	54	13	136

B. Pengorganisasian

Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi akan dilaksanakan secara *collaborative actions* dengan lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Pemerintah daerah membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi, antara lain: Perguruan Tinggi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat umum. Forum Koordinasi kemudian akan bersinergi dengan tim percepatan penurunan stunting mengingat terdapat banyak irisan dalam berbagai intervensi untuk pencapaian tujuan.

Agar penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul berjalan secara optimal dan terarah maka perlu membentuk Forum Koordinasi dibentuk dengan SK Bupati Bantul Nomor 295 Tahun 2023. Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul Tahun 2024-2026 terdiri dari Forum Pengarah dan Forum Teknis. Forum Teknis terdiri dari:

- a. Pokja Ketersediaan;
- b. Pokja Keterjangkauan;
- c. Pokja Pemanfaatan; dan
- d. Pokja Kelembagaan.

Forum Pengarah memiliki tugas:

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- b. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati Bantul kepada Gubernur DIY;
- c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
- e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati Bantul kepada Gubernur DIY.

Forum Teknis memiliki tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
- b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum Pengarah;
- c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada Forum Pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum Pengarah;
- g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

Pokja memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pokja Ketersediaan memiliki tugas menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan daerah;
- b. Pokja Keterjangkauan memiliki tugas menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.;
- c. Pokja Pemanfaatan memiliki tugas menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.; dan
- d. Pokja Kelembagaan memiliki tugas menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

C. Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga berperan untuk melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi. Sektor non pemerintah dan lembaga masyarakat yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media.

D. Pembiayaan

Penting untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program. Dengan demikian dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan ketersediaan dana sehingga apabila terjadi kekurangan dapat diketahui lebih awal dan direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber lainnya. Besaran dana indikatif untuk program dan kegiatan terdapat pada RPJMD, Renstra OPD, serta rencana pendanaan sumber lain.

V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun outcome dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG dilakukan terhadap Strategi, Aksi, dan capaian indikatornya beserta proses pelaksanaannya. Capaian kinerja indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan outcome dari RAD- PG 2024-2026.

B. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh masing-masing OPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah:

- a. Indikator dan capaian masing-masing OPD dan lembaga terkait dalam mendukung strategi dan aksi dalam mendukung strategi dan aksi
- b. Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya
- c. Rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya

VI. PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan acuan peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Bantul selama periode 2024-2026. Dokumen ini bertujuan mewujudkan dan memperkuat ketahanan pangan dan gizi sekaligus mendukung tercapainya target SDGs dan RAN-PG. RAD-PG Kabupaten Bantul Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) untuk meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi dan perencanaan program dan kegiatan pangan dan gizi, menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi, memilih intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan serta bersinergi dengan berbagai elemen dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.

LAMPIRAN

Strategi, Aksi, Indikator kinerja/ouput, Sub Kegiatan Dalam Periode RAD-PG 2024-2026

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
1	Tujuan Strategis: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman																		
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	1	Luas sentra produksi kelompok pangan komoditas :							630,06	630,06	530,06	730,06	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DKPP			
				Padi	Ha	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000									
				Jagung	Ha	700	700	700	700	700									
				Kedelai	Ha	400	400	400	400	400									
				Bawang Merah	Ha	300	300	300	300	300									
				Cabe	Ha	400	400	400	400	400									
				Ubi Jalar	Ha	100	100	100	100	100									
				Ubikayu	Ha	600	600	600	600	600									
			2	Kecamatan sentra produksi kelompok pangan hortikultura :															
				Cabe, Bawang Merah	Kecamatan	3	3	3	3	3									
				Pisang	Kecamatan	3	3	3	3	3									
			3	Kecamatan sentra produksi kelompok hewani (ternak)	Kecamatan	7	8	9	9	10	56,00	56,00	56,00	86,00	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	DKPP			

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target			Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
			4 Kecamatan sentra produksi kelompok hewani (ikan)	Kecamatan	7	8	9	10	11	13,89	20,95	20,95	35,95	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	DKP
	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/ kota		5 Peningkatan produksi produk pertanian pangan	Persen	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	630,06	630,06	530,06	730,06	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DKPP
			6 Persentase kenaikan Produksi Daging	Persen	0,85	0,85	0,80	0,87	0,70	56,00	56,00	56,00	86,00	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	DKPP
			7 Persentase kenaikan Produksi Telur	Persen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30						
			8 Peningkatan Produksi Ikan Konsumsi	Persen	0,29	0,38	0,41	0,44	0,46	183,98	197,79	501,98	180,98	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DKP
										13,89	20,95	20,95	35,95	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	DKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	9 Jumlah kalurahan fokus lokasi penurunan stunting yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan.	Kalurahan	10	8	1	2	2	250,00	200,00	25,00	50,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKPP	
			10 Pelatihan Budidaya Ayam/Itik Unggul Lokal Petelur	Kelompok	NA	NA	2	2	2	50,00	50,00	50,00	50,00	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	DKPP	
		Optimalisasi sistem produksi pangan melalui urban farming, integrated farming maupun smart farming dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas	11 Pelatihan Urban farming electrifying to smart farming	Kelompok	NA	NA	2	2	2	-	120	120	120	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DKPP	
			12 Pelatihan Taruna Tani dengan tema Pertanian Terpadu/Integrated Farming	Kelompok	1	12	8	4	4	300	200	100	100	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DKPP	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
13			Pengamatan budidaya bawang merah dengan teknologi sensor	Kelompok	1	1	1	1	1	630	630	530	730	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DKPP					
14			Irigasi Kabut dengan Elektrififying pada usahatani bawang merah	Kelompok	1	1	1	1	1											
15			Luasan usahatani dengan elektrififying	Ha	25	100	100	100	100											
16			Integrated Pest Management (IPM) Lanscape	Ha	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000											
17	Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	17	Kegiatan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebun bibit daerah (KBD) secara konsisten untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan pekarangan.	Unit	1	1	2	4	5	25,00	25,00	50,00	100,00	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	DKPP					

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	18	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan di desa lokus penurunan stunting	KWT	10	8	1	2	2	250,00	200,00	25,00	50,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKPP
			19	Jumlah Kader KB yang melaksanakan kegiatan UPPKA (Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor)	Kader / Apsektor KB	630	408	450	500	600	31,50	20,40	22,50	25,00	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			20	Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) yang melaksanakan fasilitasi tumbuh kembang balita yang terdiri dari pola asuh dan pemenuhan gizi balita	Jumlah BKB	306	306	306	306	306	15,30	15,30	15,30	15,30	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3APPKB
			21	Program Dashyat (Dapur Sehat Atasi Stunting) di Kampung KB	Kelompok	50	50	50	50	50	30,70	30,70	50,70	60,50	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DP3APPKB
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	1	Jumlah Kalurahan yang menerima intervensi program desa pangan aman	Kalurahan	1	2	2	2	2						BPAOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	2	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	Persen	70	80	80	80	80	18,00	18,00	18,00	18,00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah kabupaten/kota	DKPP
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	3	Persentase pangan segar asal hewan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	Persen	90	90	90	90	90	10,00	10,00	10,00	10,00	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	DKPP
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	4	Persentase pangan segar asal ikan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	Persen	80	81	82	83	84	10,00	10,00	10,00	10,00	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	DKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Penguatan kapasitas IKM dan UMKM olahan pangan dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan	5	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dalam rangka menjamin keamanan pangan	IKM	31	25	30	30	30	30,00	30,00	30,00	30,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DKUKMPP
			6	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan dalam rangka menjamin keamanan pangan	Usaha Mikro	20	20	20	20	20	30,00	30,00	30,00	30,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	DKUKMPP
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota	1	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (beras)	Ton	15.036	41.286	51.286	61.286	71.286	165,40	454,15	564,15	674,15	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	DKPP
			2	Jumlah kelompok yang memperoleh fasilitasi kegiatan cadangan pangan masyarakat	Kelompok	2	2	2	2	2	35,00	35,00	35,00	35,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	3	Pemanfaatan lahan pekarangan	Kelompok	5	3	4	4	4	125,00	75,00	100,00	100,00	Pengembangan Lumbung Mataraman	DKPP
			4	Jumlah lumbung pangan yang operasional	Unit	2	3	3	4	4	20,00	20,00	20,00	20,00	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur logistik	DKPP
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss	1	Pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran	Kelompok	1	1	1	1	1	25,00	25,00	25,00	25,00	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	DKPP
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	2	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	Persen	100	100	100	100	100	12,00	12,00	12,00	12,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	DKUKMPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target			Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			3	Jumlah penyuluh yang mendapatkan pendampingan/ sosialisasi kalender tanam	Jumlah	NA	NA	1	1	1	-	25,00	25,00	25,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DKPP
			4	Komunikasi Informasi edukasi (KIE) terkait adaptasi petani terhadap perubahan iklim.	kelompok	NA	NA	2	2	2	-	50,00	50,00	50,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DKPP
		Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i>	5	Jumlah Usaha Mikro Pangan yang didampingi/ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka pengendalian <i>food loss</i>	UM	20	20	20	20	20	30,00	30,00	30,00	30,00	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	DKUKMPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	6	Tersedianya data food loss (pangan tercecer) setiap tahun	Jumlah data	11	11	11	11	11	15,00	15,00	15,00	15,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DKPP
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	1	Jumlah komoditi pangan pokok yang diberikan biofortifikasi	Jumlah	1	1	1	1	1					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	DKPP (APBN)
			38													
2 Tujuan Strategis: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman																
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	1	Jumlah gelar pangan murah/bazar	Kali	NA	4	4	4	4	63,00	63,00	63,00	63,00	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
2			Penyelenggaraan Promosi/ Pameran Pertanian	Kali	16	16	16	16	16	162,18	162,18	162,18	162,18	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DKPP				
3			Penyelenggaraan Pasar Tani	Kali	30	50	50	50	50										
4			Jumlah toko pedagang/pengecer beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan)	Jumlah Toko	39	39	39	39	39								BULOG		
5			Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat distributor/ pelaku usaha	kali	12	12	12	12	12	132,56	147,82	156,21	175,39	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	DKUKMPP				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
6			Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat konsumen (5 pasar)	kali	313	313	313	313	313										
7			Tersedianya sistem informasi pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan pokok/strategis	Jumlah	1	1	1	1	1										
8			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten	Jumlah	2	2	2	2	2	23,81	26,19	27,50	30,49	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	DKUKMPP				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target			Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
9			Persentase jumlah pangan pokok yang disalurkan ke unit distribusi	Persen	100	100	100	100	100	63,00	63,00	63,00	63,00	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	DKPP
10			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	12	12	12	12	12						
11			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan	Laporan	3	3	3	3	3	50,00	50,00	50,00	50,00	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	DKPP
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	18	18	18	18	18	12,00	12,00	12,00	12,00	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	1	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan	persen	100	100	100	100	100	15,00	15,00	15,00	15,00	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	DKPP
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	2	Jumlah komoditas pangan pokok/strategis termasuk sayur dan buah yang dipantau dalam sistem informasi harga pangan	Jumlah	22	26	26	26	26	26	12,00	12,00	12,00	12,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM/Koperasi/ BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	1	Jumlah Koperasi sektor pangan yang dibina untuk menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan untuk keperluan masyarakat	Koperasi	1	1	1	1	1	12,00	12,00	12,00	12,00	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DKUKMPP
			2	Pendampingan Koperasi Pertanian	Koperasi Pertanian	NA	NA	3	3	3	-	30,00	30,00	30,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target			Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
2.4	Pengembangan sistem jaringan pangan sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	1	Pemanfaatan beras fortifikasi atau biofortifikasi untuk penurunan stunting	Lokasi	4	4	4	4	4					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	DKPP (APBN)
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas BPNT/Program Sembako	2	Jumlah penerima program BPNT	Jumlah penerima	86.591	85.504 (data sd TW 3)	NA	NA	NA					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos (APBN)
			3	Jumlah e-warung yang menyediakan jenis pangan yang beragam sesuai dengan Pedum	Jumlah	241	Kerja sama e-warung sdh berakhir sejak diterimakan BPNT secara tunai									Kemensos

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target			Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	4	Jumlah e-warung yang menyediakan suplemen gizi dalam program bantuan sosial untuk kelompok marginal (perempuan, gelandangan, fakir miskin, anak jalanan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Jumlah	241	Kerja sama e-warung sdh berakhir sejak diterimakan BPNT secara tunai								Kemensos	
			5	Jumlah penerima manfaat program permakanaan	orang	2.038	1.243	NA	NA	NA					Kemensos	
			6	Jumlah penerima manfaat Boga Sehat, menu ramah lansia	orang	900	900	1112	1112	1112	6.596,17	6.938,23	6.938,05	7.216,56	Penyediaan Permakanan	Dinsos

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	1	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (beras)	Ton	15,036	41,286	51,286	61,286	71,286	5,00	5,00	5,00	10,00	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DKPP
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	2	Jumlah desa rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Jumlah Desa	NA	1	1	1	1	6,00	6,00	6,00	6,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	1	Tersedianya kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pengolahan pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan	Jumlah	75	75	75	75	75	160,00	160,00	160,00	160,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMKAL				
			2	Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi baduta dan balita	Jumlah	75	75	75	75	75	75									
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi	3	Jumlah desa rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi	Jumlah	NA	1	1	1	1	6,00	6,00	6,00	6,00			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	DKPP		

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
			4	Jumlah desa mandiri pangan dalam tahap kemandirian	Jumlah	21	21	21	21	21										
			5	Pemberian Makanan Tambahan	paket	1	1	1	1	1	25,00	25,00	25,00	25,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	DKPP				
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	1	Tersedianya sistem informasi ketersediaan dan harga pangan untuk mendukung sistem distribusi pangan	Jumlah	1	1	1	1	1	75,00	75,00	75,00	75,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	DKUKMPP				
			2	Komunikasi Informasi Edukasi pengembangan dan pemasaran usaha tani dengan memanfaatkan teknologi digital	Kelompok	NA	NA	1	1	1	NA	25,00	25,00	25,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DKPP				
			31																	
3	Tujuan Strategis :																			

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)																			
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	1	Tersedianya analisis dan memanfaatkan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen	1	1	1	1	1	5,00	5,00	5,00	5,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	DKPP			
			2	Tersedianya data skor PPH ketersediaan	Dokumen	1	1	1	1	1	50,00	50,00	50,00	50,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	DKPP			

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan	1	Pendampingan dalam pemanfaatan informasi peta rawan pangan untuk pengembangan kebijakan ketahanan pangan	kali	1	1	1	1	1	50,00	50,00	50,00	50,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	DKPP				
			2	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	12	14	14	14	14										
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganeekaragaman konsumsi pangan	1	Pendampingan Pelaksanaan Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Kelompok	2	2	2	2	2	5,00	5,00	5,00	5,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKPP				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	2	Sosialisasi "isi piringku dengan pangan B2SA"	Kali	5	5	5	5	5	10,00	10,00	10,00	10,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKPP
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	3	Jumlah kampanye gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	Kali	37	22	10	12	15	10,00	10,00	10,00	10,00	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP
			4	Jumlah kampanye gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	Kali	4	4	4	4	4	10,00	10,00	10,00	10,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	TP PKK

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	5 Tersedianya dokumen kebijakan yang mengadopsi pesan kunci Pedoman Gizi Seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	10,00	10,00	10,00	10,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DIKPORA				
			6 Jumlah sekolah yang menerapkan pedoman gizi dan pangan (PGS) dalam pengelolaan kantin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	SD	NA	135 (36,78%)	135	140	140	140										

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline				Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	7	Jumlah Tenaga Pendamping di Desa yang pernah mendapat pelatihan/pendampingan komunikasi perubahan perilaku antar individu.	Jumlah Tenaga Pendamping	0	0	75	75	75	-	75,00	75,00	75,00	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	DPMKAl		
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/celebrity lokal untuk kampanye perubahan perilaku	8	Penyelenggaraan talk show radio dengan tema perubahan perilaku konsumsi pangan	kali	1	1	1	1	1	2,00	2,00	2,00	2,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo		

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
9			Jumlah pelaksanaan bimbingan perkawinan (peningkatan pengetahuan keluarga baru)	pasang caten	5634	3940 (s.d Sept 2023)	100%	100%	100%								Kemenag		
10			Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	angkatan	14	25	25	25	25								Kemenag		
11			Bimbingan Keluarga Sakinah	angkatan	15	15	15	15	15								Kemenag		
12			Jumlah lokasi sosialisasi perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Lokasi	5	5	5	5	5	10,00	10,00	10,00	10,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		DKPP			
13	Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA		Tersedianya platform rujukan informasi jurnalis dan media	jenis	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	Monitoring opini dan aspirasi publik		Diskominfo			

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target	Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik, dan deteksi dini	14 Jumlah kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan dalam pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Kali	1	1	1	1	1	1	5,00	5,00	5,00	5,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DINKES
		Melakukan orientasi agent of change pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	15 Jumlah orang yang sudah mengikuti orientasi agent of change Penyakit Tidak Menular (PTM) untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik.	Orang	0	0	43	43	43	-	50,00	50,00	50,00	50,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINKES

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub	Penanggung
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Jawab					
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	16	Jumlah orang yang sudah mengikuti orientasi agent of change terkait pola makan sehat	orang	92	92	92	92	92	92	50,00	50,00	50,00	50,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	TP PKK			
			17	Jumlah tim penggerak PKK (kecamatan/ desa) yang mendapatkan peningkatan kapasitas/pemda mpingan perempuan (untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak)	Tim	92	92	92	92	92	92									

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
			18 Program AKU HATINYA PKK (Amalkan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman) termasuk ada lumbung pangan keluarga skala kecil, memperhatikan Pangan B2SA, PIRT, Gemari	Tim	92	92	92	92	92										
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	1 Jumlah sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Kali	5	5	5	5	5								BPOM		

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	1	Kegiatan isi piringku dengan pangan lokal	Kali	5	5	5	5	5	10,00	10,00	10,00	10,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKPP
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI	1	Pendampingan pemberian ASI Eksklusif oleh kader pada bayi	Persen	83.30%	83.40%	83.50%	83.60%	83.70%	1.127,15	1.127,15	1.127,15	1.127,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINKES

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
			2	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	Persen	83.30%	83.40%	83.50%	83.60%	83.70%									
			3	Cakupan bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persen	76.26	76.36	76.46	76.56	76.66									
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	4	Cakupan Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tambahan	Persen	100	100	100	100	100									
			5	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	Persen	99.87	100	100	100	100									

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024	1	Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A.	Persen	99.42	100	100	100	100										
			2	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	83.09	89.64	89.65	89.66	89.67										
			3	Cakupan Remaja Putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) dan dikonsumsi	Persen	41.97	74.64	74.65	74.66	74.67										

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
			4	Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A	Persen	99.05	99.4	99.5	99.6	99.7										
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	5	Penyusunan SOP tata kelola pelayanan gizi dalam situasi darurat	dokumen	27	27	27	27	27										
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	6	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	470,00	471,00	472,00	473,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DINKES				
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	7	Jumlah puskesmas yang melakukan kampanye Gerakan Lawan Obesitas (GENTAS)	Puskesmas	27	27	27	27	27										

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026						
8			Jumlah puskesmas yang melakukan pendampingan desa untuk kegiatan Posbindu	Puskesmas	27	27	27	27	27										
9			Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	Posbindu	150	170	190	200	220										
10			Persentasi anak obesitas usia sekolah (7-15 tahun) yang dilaksanakan pengukuran Indeks Masa tubuh (IMT)	Persen	100	100	100	100	100	70,00	70,00	70,00	70,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINKES				

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat	11	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	SR	NA	1000	1000	1000	1000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Perluasan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	DPU PKP
			12	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	SR	NA	320	330	430	450	1.600,00	1.620,00	1.782,00	1.960,00	Perluasan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPU PKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
13			Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Unit	NA	100	100	100	100	100	1.921,00	2.000,00	2.069,00	2.220,00	Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	DPU PKP
14			Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	21	100	110	120	130	130	2.120,00	2.348,00	2.493,00	2.692,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	DPU PKP
15			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit	170	190	190	190	190	190	3.417,00	3.740,00	3.799,00	3.914,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPU PKP
16			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit	NA	100	100	100	100	100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPU PKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
3.8	Pengendalian pemborosan pangan (<i>food waste</i>);	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	1	Pelatihan pengelolaan sampah	kali	11	32	12	14	14	800,00	300,00	350,00	350,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH
			2	Pendampingan pelatihan pengelolaan sampah	kali	6	55	55	60	60	75	75	75	75	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH
		3	Pelatihan pengelolaan sampah	kali	1	1	1	1	1	1	25,00	25,00	25,00	25,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	TP PKK
		4	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	kali	5	5	5	5	5	5	10,00	10,00	10,00	10,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			5	Fokus Grup Diskusi dengan tema "Pengendalian Food Waste"	kali	NA	1	1	1	1	10,00	10,00	10,00	10,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda
			6	Kampanye perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman (B2SA), food loss dan food waste bersama PHRI	Kali	NA	1	1	1	1	10,00	10,00	10,00	10,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Mendorong peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat	1	Jumlah unit usaha tersertifikat MD (Makanan Dalam Negeri)	UKM	NA	NA	7	7	7						BPOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
3.1 0	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong peningkatan produk pangan olahan bersertifikat	1	Jumlah fasilitasi pengajuan sertifikasi halal pada IKM	IKM	31	25	30	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DKUKMPP
			2	Jumlah fasilitasi pengajuan sertifikasi halal pada Usaha Mikro	Usaha Mikro	10	10	10	10	10	53,62	56,56	62,20	76,13	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	DKUKMPP
			54													
4	Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi															
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	1	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor/pemangku kepentingan	kali	tidak ada	1	2	2	2	1,00	2,00	2,00	2,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Setda (Bag Kesra)

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target			Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			2	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor/pemangku kepentingan	kali	tidak ada	4	2	2	2	4,00	2,00	2,00	2,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah	1	Jumlah kegiatan koordinasi dengan mitra lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi.	kali	tidak ada	1	2	2	2	1,00	2,00	2,00	2,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Setda (Bag Kesra)
			2	Jumlah kegiatan koordinasi dengan mitra lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi.	kali	tidak ada	4	2	2	2	4,00	2,00	2,00	2,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target			Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .	3	Jumlah sektor swasta yang aktif dalam kampanye perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman (B2SA), <i>food loss</i> dan <i>food waste</i>	Jumlah Sektor Swasta	3	3	5	5	7	10,00	10,00	10,00	10,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
4.3	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	1	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengaruhstamaa n Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	25	45	45	45	45	187,82	187,82	187,82	187,82	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP3APPKB

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	2	Jumlah pendampingan terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarutamaan Hak Anak)	Lembaga	40	40	40	40	40	28,92	28,92	28,92	28,92	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	3	Jumlah organisasi perempuan yang melakukan kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)	Jumlah organisasi perempuan	1026	1026	1026	1026	1026	194,00	195,00	196,00	197,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINKES
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	1	Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	perda	0	1	1	1	1	20,00	20,00	40,00	40,00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline					Target					Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026							
			2	Jumlah regulasi turunan dari Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	regulasi	0	0	0	1	1										
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	3	Jumlah publikasi penelitian mengenai produk inovasi pangan yang layak untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Jumlah publikasi	8	2	2	2	2	67,02	70,38	67,02	70,38	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda				
4.5	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	1	Jumlah hasil riset produk inovasi pemanfaatan pangan lokal yang diterapkan untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Jumlah hasil riset	2	2	2	2	2										

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Baseline		Target				Anggaran (Juta Rupiah)				Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
			2 Jumlah sektor swasta yang peduli terhadap inovasi pangan di Bantul	Jumlah Sektor Swasta	NA	1	1	1	1	1	2,00	2,00	2,00	2,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
Total Indikator			13													
			136													